

KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI
(Telaah Pemikiran M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin)

SKRIPSI



JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2021

ABSTRAK

Mukhlis, Miftahul. 2021. Konsep Pembangunan Ekonomi (Telaah Pemikiran M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin). Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah.

Kata kunci: Pembangunan Ekonomi Islam, M. Umer Chapra, KH. Ma'ruf Amin.

Bangkitnya para pemikiran ekonomi Islam terkhusus dalam pembangunan ekonomi sudah mendapat reaksi positif yang berguna untuk melakukan inisiatif pengembangan dan penyempurnaan sistem ekonomi Islam. Dalam melakukan pengembangan dan penyempurnaan, dibutuhkan sebuah pengkajian ulang dengan menelaah pemikiran dari tokoh ekonomi Islam. Maka dalam hal ini, peneliti ingin menelaah pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra, KH. Ma'ruf Amin, persamaan dan perbedaan, serta relevansinya pemikiran kedua tokoh dengan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data dan analisis kualitatif melalui deskripsi dan analisis objek penelitian melalui membaca dan menelaah karya tokoh atau pemikiran tokoh serta sumber lain yang berkaitan dengan topik, yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan. Skripsi ini memakai konten analisis dan sebuah metode komparasi.

Selanjutnya, terkait pemikiran pembangunan ekonomi yang digagas oleh M. Umer Chapra memandang suatu pembangunan ekonomi harus ada pembangunan moral individu, adanya peran pemerintah, pembagian kekayaan dan pemerataan, budaya menabung dan investasi tinggi, support positif peran negara serta motivasi sangat penting. Sedangkan KH. Ma'ruf Amin mempunyai tiga pandangan (ekonomi keadilan, ekonomi keumatan dan ekonomi berkemandirian). Selain itu upaya pemberian akses modal, peningkatan kompetensi dan kapabilitas, serta perluasan akses pasar. Kedua tokoh mempunyai kesamaan pandangan etika, moral, akhlak sebagai pondasi pembangunan. Keadilan sebagai cita-cita pembangunan ekonomi dan upaya pemerataan, serta peran negara melalui kebijakan dan pendidikan kepada kepentingan masyarakat. Namun penekanan dan cara-cara yang dilakukan oleh kedua tokoh memiliki perbedaan. Secara substansi pemikiran kedua tokoh tersebut relevan dengan cita-cita pembangunan ekonomi di Indonesia. Di Indonesia pembangunan yang dilakukan dengan berdasar pada landasan dasar negara yaitu Pancasila.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1	MIFTAHUL MUKHLIS	210717076	Ekonomi Syariah	KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI: TELAAH PEMIKIRAN M. UMER CHAPRA DAN KH. MA'RUF AMIN

Telah selesai melaksanakan bimbingan dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi:

Ponorogo, 03 November 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I.
Nip. 197801122006041002

Menyetujui,

Dr. Aji Damanuri, M.E.I.
NIP. 197506022002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Konsep Pembangunan Ekonomi: Telaah Pemikiran M. Umer
Chapra dan KH. Ma'ruf Amin
Nama : Miftahul Mukhlis
NIM : 210717076
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan penguji Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana dalam bidang ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua sidang :
Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197801122006041002

Penguji 1 :
Unun Roudlotul Janah, M.Ag.
NIP. 197507162005012004

Penguji 2 :
Dr. Aji Damanuri, M.E.I.
NIP. 197506022002121003

Ponorogo, 16 November 2021
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftahul Mukhlis

NIM : 210717076

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul Sripsi : KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI

(Telaah Pemikiran M. Umer Chapra dan KH. Ma`ruf Amin)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah ini dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya buat untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 November 2021



Miftahul Mukhlis
NIM. 210717076

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MIFTAHUL MUKHLIS

NIM : 210717076

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI

(Telaah Pemikiran M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 20 Oktober 2021

Pembuat Pernyataan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMBEL' and '1000'. The signature is in black ink and appears to be 'Miftahul Mukhlis'.

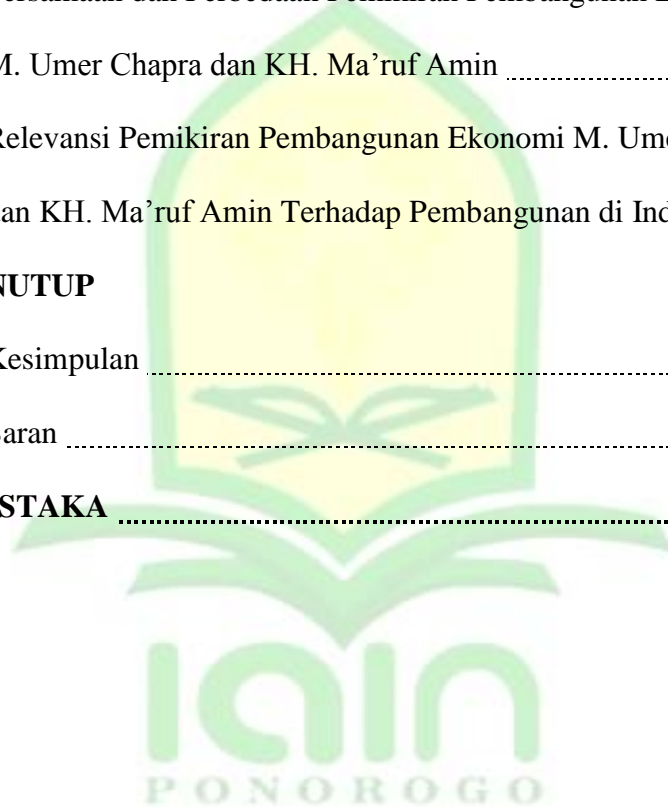
MIFTAHUL MUKHLIS
NIM. 210717076

DAFTAR ISI

COVER

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Studi Penelitian Terdahulu	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II. EKONOMI PEMBANGUNAN	
A. Konsep Pembangunan Ekonomi	13
B. Pembangunan Ekonomi Islam	18
C. Pembangunan Ekonomi Indonesia	22
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
B. Data dan Sumber Data	25
C. Teknik Pengumpulan Data	26

D. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	26
E. Analisis Data	27
BAB IV. ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN PEMBANGUNAN	
EKONOMI M. UMER CHAPRA DAN KH. MA'RUF AMIN	
A. M. Umer Chapra	29
B. KH. Ma'ruf Amin	50
C. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Pembangunan Ekonomi	
M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin	70
D. Relevansi Pemikiran Pembangunan Ekonomi M. Umer Chapra	
dan KH. Ma'ruf Amin Terhadap Pembangunan di Indonesia	75
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya cita-cita suatu bangsa adalah tercapainya keadaan masyarakat yang ideal, yakni terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial bagi semua kelas. Keadaan ini menjadi suatu beban pertanggungjawaban kepada negara melalui pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan negara, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur yang ada menuju keadaan lebih baik.¹ Meskipun pembangunan dalam suatu negara seharusnya dilakukan secara bersama-sama dari semua elemen bagian negara, yaitu pemerintah dan masyarakat. Dalam konsep pembangunan biasanya sangat erat sekali dengan konteks perubahan, dalam artian pembangun merupakan suatu perubahan yang memang terencana dan tersistem. Individu ataupun kelompok tentu akan mengharapkan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, bahkan kalau bisa menginginkan sampai ke taraf sempurna. Untuk mewujudkan hal tersebut, pastinya membutuhkan suatu perencanaan lebih yang berdasar dari pandangan rasional dan logis, sehingga seluruh elemen dalam negara (pemerintah dan masyarakat) mampu melakukan pembangunan bersama-sama menuju kemakmuran dan kesejahteraan.²

¹ Muhammad Hasan, Muhammad Aziz, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Lokal* (Makassar: CV Nurlina 2018), 2.

² Bonaraja Purba dkk, *Ekonomi Pembangunan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 1.

Pembangunan ekonomi sendiri sangat erat dengan perkembangan ekonomi dan hal ini biasanya terjadi di negara berkembang. Akan tetapi ketika melihat realita dalam negara berkembang, penduduk yang miskin masih begitu banyak. Hal itu bisa dilihat dari permasalahan dalam ekonomi yang belum mampu diselesaikan, seperti: kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar kelas sosial. Salah satu instrumen yang menjadi penyebabnya adalah kurang pemerhatian atas variabel dalam bidang lain yang menunjang ekonomi, seperti: budaya, politik, hukum dan lain sebagainya. Padahal ketika masuk dalam ranah ekonomi Islam yang sejatinya mempunyai cita-cita jauh lebih komprehensif dari hal tersebut, dimana pembangunan ekonomi bukan hanya melakukan pembangunan dalam perihal ekonomi masyarakat, akan tetapi juga meliputi pembangunan terhadap moral, etika dan mental, sehingga terwujudnya manusia secara utuh sebagai *khalifah fil ardh*.³

Pembangunan dalam ekonomi merupakan salah satu dari banyaknya strategi yang dapat direalisasikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa demi keberlangsungan hidup masyarakat. Indikator dalam perencanaan pembangunan ekonomi bisa dilihat dari tercapainya target yang ditentukan, seperti: pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kuantitas pengangguran dan tingkat kemiskinan masyarakat dalam suatu negara yang menurun. Dewasa ini, bangsa Indonesia telah banyak memperoleh kesempatan untuk melakukan pembangunan ke arah yang lebih baik lagi, namun dalam realisasinya pembangunan itu belum mampu menorehkan hasil

³ Al mizan, "Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Maqdis*, 2 (2016), 204.

yang maksimal, karena beberapa faktor yang masih menjadi kendala. Salah satu kendala mendasar yang masih belum bisa dituntaskan adalah kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat, sehingga memaksa para pakar dan praktisi untuk terus merekonstruksi strategi untuk melakukan pembangunan yang relevan agar mampu diimplementasikan di Negara Indonesia. Harapannya, tidak akan ada lagi masyarakat yang terpinggirkan, terjepit, tertindas dan tersakiti akibat sistem perekonomian yang ada.⁴

Di masa pemerintahan saat ini, Indonesia menggunakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan. Hal ini berdasarkan pada dokumen pembangunan jangka panjang dalam UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional yang bisa dilihat di Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 20 tahun ke depan (2005-2025). Selain itu, juga dijelaskan pada konsep besar pembangunan ekonomi Islam yang tertuang dalam kerangka Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 mengenai konsep ekonomi kerakyatan yang diaplikasikan dalam sektor UMKM, Pariwisata Halal, dan Perbankan Syariah yang digagas sebagai indikator utama pembangunan ekonomi Islam di Indonesia.⁵ Kerangka ini menjadi misi besar Indonesia yang selaras dengan konsep pembangunan ekonomi KH. Ma'ruf Amin.

KH. Ma'ruf Amin yang dikenal sebagai seorang sosok cendekiawan muslim dan sosok Guru Besar Ekonomi Islam, yang memiliki ilmu

⁴ Ibid., 203.

⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (Jakarta:PT. Zahir Syariah Indonesia,2018).

pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Dalam pemikirannya beliau memiliki gagasan sebuah konsep “Arus Baru Ekonomi” di Indonesia. Adapun konsep ekonomi yang dibangun antara lain: berorientasi pada keadilan seluruh rakyat Indonesia, mengedepankan ekonomi keumatan/kerakyatan, konsep kemitraan, semangat juang tinggi. Keempat konsep tersebut yang merupakan hasil dari pengejawantahan dari nilai luhur ekonomi syariah, sehingga harapan kedepannya pembangunan ekonomi di Indonesia mampu mewujudkan tatanan ekonomi bangsa semakin cerah dan mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera.⁶

Lebih dari itu, ketika berbicara tentang ekonomi Islam atau ekonomi syariah, telah banyak para cendekiawan muslim yang muncul dan terkenal, mulai dari pemikir ekonomi klasik sampai pada ekonomi kontemporer. Bahkan dalam sejarah ekonomi Islam sampai terbentuk aliran-aliran, seperti: aliran Baqir Al-Sadr, aliran Mainstream dan aliran Kritis. Salah satu dari banyaknya tokoh yang terkenal dan memperoleh banyak penghargaan yaitu M. Umer Chapra. Pemikiran ekonomi yang dibangun bersumber dari perspektif terhadap Islam sebagai solusi alternatif dalam pembangunan ekonomi. Umer Chapra merupakan sosok pemikir ekonomi yang berasal dari Pakistan, Gagasan-gagasannya banyak tertuang dalam bentuk tulisan, baik berupa buku, artikel maupun jurnal. Sampai saat ini sudah terhitung sampai sebelas buku yang telah diterbitkan, sembilan resensi buku dan enam puluh

⁶ Masyarakat Ekonomi Syariah, “Arus Baru Ekonomi syariah Di Indonesia” dalam <https://www.ekonomisyariah.org/9201/arus-baru-ekonomi-syariah-di-indonesia/>, (diakses pada tanggal 11 Oktober 2021, jam 11.17).

sembilan karya ilmiah. Karyanya itupun sudah banyak yang diterjemahkan ataupun alih ke dalam Bahasa Arab, Turki, Malaysia, Urdu, Bangladesh, Perancis, Jepang, Jerman, Spanyol dan Indonesia. Beberapa buku yang cukup mainstream dan mendapat apresiasi dari beberapa pihak atas gagasan ide cemerlang yang dituangkan, diantaranya: *Islam and The Economic Challenge* (1992), *Toward a Just Monetary System* (1985), *Islam and the Economic Development* (1994), dan *The Future of Economic: An Islamic Perspective* (2000).⁷

Kajiannya dalam ekonomi salah satunya membahas tentang pembangunan ekonomi yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang adil dan sejahtera tidak akan mungkin terealisasi tanpa adanya sebuah pembangunan etika dan moral. Dalam konsep pembangunan ekonomi Chapra didasarkan atas 3 hal yaitu *tauhid*, *khilafah* dan *'adalah*. Selain itu, pemikiran ekonomi dari Umer Chapra yang banyak dijadikan pembahasan adalah konsep *falah* dan *hayatan thoyyibatan* yang membahas substansi dari tantangan ekonomi negara. Di dalam konsep tersebut ia mempunyai pandangan bahwa setiap manusia mempunyai dominasi dalam pandangan (*worldview*) tentang hakikat kehidupan manusia dan alam.⁸ Di samping itu Chapra pernah menyatakan sebuah argumen bahwasanya kapitalisme dalam bentuk saat ini yang telah banyak dipoles masih tetap mempunyai kekurangan

⁷ Fadlan, "Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam: Telaah Pemikiran M. Umer Chapra," *Nuansa*, 2 (2018), 400.

⁸ Moh. Musfiq Arifi, "Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam: Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun dan Umer Chapra," *Al-Tijary* 2 (2019), 126.

dasar untuk dapat memungkinkan menjadi landasan suatu entitas sosial-ekonomi yang berkeadilan.⁹

Bangkitnya para pemikiran ekonomi Islam terkhusus dalam pembangunan ekonomi yang berbasis Islam sudah mendapat reaksi positif yang berguna untuk melakukan inisiatif pengembangan dan penyempurnaan dalam sistem ekonomi Islam di negara Islam maupun negara yang mayoritas masyarakatnya Islam. Dalam melakukan pengembangan dan penyempurnaan, maka dibutuhkan sebuah pengkajian ulang dengan menelaah pemikiran dari para pakar dan pemikir ekonomi Islam yang dipakai suatu negara maupun yang banyak dijadikan sebuah rujukan. Maka dalam penelitian ini, peneliti ingin menelaah pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin dan melakukan perbandingan terhadap kedua tokoh tersebut karena diyakini bahwa pemikiran kedua tokoh ekonomi Islam tersebut masih relevan untuk dikaji, dikembangkan dan diaktualisasikan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan, maka penulis merumuskan judul dalam penelitian skripsi: **“Konsep Pembangunan Ekonomi: Telaah Pemikiran Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin”**

B. Rumusan Masalah

Agar mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini merumuskan masalah:

⁹ Bayu Adi Saputra, “Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut M. Umer Chapra,” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 4.

1. Bagaimana pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin ?
2. Apa persamaan dan perbedaan pemikiran pembangunan ekonomi kedua tokoh?
3. Bagaimana relevansi pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun untuk tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Memahami pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran pembangunan ekonomi kedua tokoh.
3. Mengetahui relevansi pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat baik untuk peneliti maupun orang lain, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif untuk khazanah keilmuan dan pengembangan teoritis, khususnya terkait dengan konsep pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin. Selain itu sebagai wacana dalam mengembangkan pembaharuan pemikiran ekonomi kontemporer, terkhusus dalam pengembangan pembangunan ekonomi Islam secara komprehensif. Dari hasil penelitian

ini harapannya para pemikir ekonomi di Indonesia agar bisa lebih serius dalam mengkaji dan mendalami nilai yang terkandung dalam pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin terhadap pembangunan Indonesia.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi praktisi ekonomi, sebagai langkah awal guna memberikan sebuah motivasi untuk mengkaji dan mendalami pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin agar mampu menginterpretasikan pemikiran dari dua tokoh tersebut sehingga mampu direalisasikan dalam pembangunan di Indonesia.
- b. Bagi akademisi, sebagai tambahan informasi agar mampu menambah wawasan terkait wacana pemikiran pembangunan ekonomi yang bisa digunakan sebagai materi atau bahan diskusi kepada anak didiknya.
- c. Bagi pembaca, supaya mampu memahami pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin sehingga bisa dijadikan sebagai referensi dalam melakukan diskusi maupun penelitian selanjutnya.
- d. Bagi penulis, sebagai khazanah dalam menambah ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberikan pandangan yang lebih luas dalam melihat pemikiran dan realitas pembangunan ekonomi. Serta sebagai pertanggungjawaban dalam menuntaskan tugas di bidang akademik untuk menyelesaikan studi S1 Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN Ponorogo).

E. Studi Penelitian Terdahulu

Pertama, Skripsi Moh. Tohir Tahun 2014. Lembaga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul: *Rekonstruksi Pemikiran Pembangunan ekonomi Islam Menurut Pemikiran AL-Ghazali, Ibn Khaldun dan M.Umer Chapra*. Dengan kesimpulan: Sumbangsih pemikiran Al-Ghazali dalam pembangunan ekonomi yaitu tercapainya unsur *maqashid syari'ah*. Pada pemikiran Ibnu Khaldun menjelaskan tentang harmonisasi segala unsur pembangunan, yaitu manusia, sumber daya alam, organisasi masyarakat, syariah semuanya digerakkan oleh pemerintah. Sedangkan Chapra menekankan pembangunan pada moral, keadilan dan efisien. Pada strategi pembangunan Capra mempunyai gagasan diantaranya peningkatan kapasitas SDM, penghapusan atas penumpukan kekayaan, rekonstruksi ekonomi, dan rekonstruksi sistem keuangan.¹⁰

Kedua, Bayu Adi Saputra tahun 2016. Lembaga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul: *Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran M. Umer Chapra*. Dengan kesimpulan bahwa konsep pembangunan ekonomi Islam merupakan pembangunan yang paling adil dan menyeluruh. Cakupan dari konsep pembangunan islam meliputi tauhid, khilafah dan keadilan. Dalam pembangunan ekonomi Islam harus memberikan prioritas pada tujuan penting seperti: pertumbuhan yang diiringi dengan tenaga kerja yang penuh, kestabilan ekonomi, keadilan distribusi, dan kepedulian terhadap alam. Adapun indikator pembangunan ekonomi berupa

¹⁰ Moh. Tohir, "Rekonstruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan M. Umer Chapra," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

objek, subjek dan peran pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pembangunan.¹¹

Ketiga, Arif Soleh Tahun 2011. Lembaga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul: *Konsep Pembangunan Ekonomi: Studi Komparatif Pemikiran Mubyarto dan Umer Chapra*. Dengan kesimpulan bahwa baik dari Mubyarto maupun Chapra memiliki kesamaan pemikiran dalam relevansi dan urgensi. Pemikiran dari kedua tokoh bisa untuk dikembangkan mengingat karena perlunya masyarakat Indonesia lepas dari keterikatan dan ketergantungan dari negara asing. Selain itu dasar-dasar dimensi moral dan keadilan dengan keadaan masyarakat Indonesia yang membutuhkan reformasi dalam bidang ekonomi di rasa telah tepat.¹²

Keempat, Ahmad Faqih tahun 2017. Lembaga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Judul: *Analisis Pemikiran The Kian Wie Tentang Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Dengan kesimpulan bahwa peran negara dalam pembangunan ekonomi Islam, The Kian Wie dan Indonesia di dalam ekonomi pembangunan mempunyai kesamaan misi bahwa negara mempunyai peran penting dalam melakukan pembangunan ekonomi. Di sisi lain antara Islam, The Kian Wie dan Indonesia mempunyai perbedaan yaitu dengan tidak memasukkan unsur

¹¹ Bayu, "Pemikiran...".

¹² Arif Soleh, "Konsep Pembangunan Ekonomi: Studi Komparatif Pemikiran Mubyarto dan Umer Chapra," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

spiritual dengan tegas dalam upaya melakukan pembangunan ekonomi dan pemerataan kecuali penawaran sistem ekonomi Islam.¹³

Kelima, Yuni Budiawati tahun 2014. Lembaga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul: *Konsep Pembangunan Perekonomian Indonesia: Studi Komparatif Pemikiran Bung Hatta dan Syarifuddin Prawiranegara*. Dengan kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi Bung Hatta dan Syarifuddin sama-sama membela hak manusia dan rakyat kecil dan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM di Indonesia sebagai pondasi pembangunan. Sedangkan perbedaannya bisa dilihat dari keduanya menghadapi masalah pembangunan, Moh. Hatta fokus pada koperasi yang menekankan budaya gotong royong dan syarifuddin fokus pada bank dengan prinsip kestabilan moneter. Namun kedua konsep pembangunan ekonominya ketika dilihat dari perspektif Islam selaras dengan tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan keadilan yang merata dengan memegang prinsip *halalan wa toyyiban*.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Agar bisa mendapatkan gambaran yang kongkrit mengenai sistematika dalam pembahasan penelitian ini untuk bisa menjadikan sebuah kesatuan yang sistematis dan utuh, maka disini penulis akan memaparkan rangkaian dari sistematika pembahasan penelitian ini:

¹³ Ahmad Faqih, "Analisis Pemikiran The Kian Wie Tentang Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

¹⁴ Yuni Budiawati, "Konsep Pembangunan Perekonomian Indonesia: Studi Komparatif Pemikiran Bung Hatta dan Syarifuddin Prawiranegara," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini membahas terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori pembangunan ekonomi. Dalam bab ini membahas tentang konsep pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi Islam dan pembangunan ekonomi Indonesia.

Bab III metode penelitian. Pada bab ini berisi terkait jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data dan analisis data

Bab IV analisis komparatif pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin. Bagian bab ini peneliti memaparkan data terkait latar belakang pemikiran, karya, karir dan pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin. Serta peneliti menganalisis pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan Ma'ruf Amin, persamaan dan perbedaan pemikiran pembangunan ekonomi kedua tokoh, serta mencari relevansi konsep pembangunan ekonomi dari kedua tokoh terhadap pembangunan di Indonesia.

Bab V penutup. Bab terakhir ini membahas terkait kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian ke depan agar lebih baik.

BAB II

EKONOMI PEMBANGUNAN

A. Konsep Pembangunan Ekonomi

1. Definisi pembangunan ekonomi

Karena kompleksnya dalam permasalahan ekonomi maka muncul sebuah pembahasan fokus yang lebih detail, salah satunya dalam ekonomi makro dan mikro yaitu tentang pembangunan ekonomi. Adapun definisi tokoh-tokoh terkait pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Lauterbach, pembangunan merupakan upaya dalam menciptakan kondisi yang lebih baik bagi manusia dalam suatu negara secara komprehensif yang selaras dengan kebutuhannya dengan tanpa mengakibatkan gangguan pada nilai dan cara hidupnya.
- b. Menurut Todaro, Pembangunan merupakan sebuah upaya pada manusia baik individu atau kelompok secara sadar dan sistematis dalam proses tanpa henti untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.
- c. Menurut Kartasasmita, pembangunan merupakan proses merubah keadaan menuju pada keadaan lebih baik ¹.

Maka bisa diartikan bahwa pembangunan ekonomi merupakan sebuah upaya yang secara sadar, terencana dan sistematis yang dilakukan manusia guna mewujudkan sebuah kehidupan menjadi lebih baik melalui

¹ Moh. Tohir, "Rekonstruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan M. Umer Chapra," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 15.

perubahan positif dengan tetap mempertahankan nilai sosial pada masyarakat.

2. Teori dalam pembangunan ekonomi

Beberapa teori pembangunan ekonomi dapat dilihat dari aliran-aliran di bawah ini yang mencoba menemukan penyebab dalam proses dan pertumbuhan ekonomi.

a. Aliran Klasik

Menurut aliran ini pertumbuhan dalam ekonomi dikarenakan adanya sebuah pacuan antara perkembangan atas kemajuan teknologi dengan perkembangan jumlah penduduk. Pada mulanya teknologi berjalan lebih cepat dari pertumbuhan penduduk, tetapi pada akhirnya terjadi sebaliknya hingga akan merubah perekonomian mengalami kendala dan kemacetan.²

b. Karl Marx (Marxis)

Dalam teori marx perubahan pada keadaan bukan karena kesadaran manusia secara alamiah, akan tetapi keadaanlah yang akan membentuk kesadaran tersebut. Jadi menurutnya perkembangan dalam pembangunan ekonomi disebabkan karena memang keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja..

c. Aliran Neo-Klasik

Aliran ini mempunyai pandangan bahwa perkembangan ekonomi merupakan sebuah proses gradual yang harmonis dan

² Muhammad Hasan, Muhammad Aziz, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Lokal* (Makassar: CV Nurlina 2018), 24.

kumulatif. Dalam perkembangan ekonomi menurutnya ada beberapa aspek seperti adanya akumulasi kapital sebagai faktor yang penting dan aspek internasional

d. Teori Schumpeter

Teori ini menolak dari pandangan neo klasik, schumpeter menyatakan bahwa perkembangan dalam ekonomi bukan suatu proses yang harmonis dan gradual akan tetapi merupakan sebuah perubahan yang terjadi secara spontan dan terputus-putus. Dari gejala inilah yang menimbulkan sebuah perambangan

e. Analisis Post-Keynesian

Pada analisis teori ini mempunyai padangan penambahan pada penduduk (manusia) harusnya juga diikuti dengan pendapatan riil dan kesempatan dalam bekerja untuk mencegah adanya pengangguran dan kemiskinan.³

3. Aspek pembangunan ekonomi

Pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh dua aspek yang begitu penting, yaitu: aspek ekonomi dan non-ekonomi.

a. Aspek ekonomi

Pada aspek ekonomi hal-hal yang mempengaruhi terhadap pembangunan adalah: sumber daya alam, akumulasi dalam modal, organisasi dan perkembangan dalam kemajuan teknologi. Melalui aspek ini nantinya pembangunan ekonomi bisa dilakukan.

³ Bayu Adi Saputra, "Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut M. Umer Chapra," *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 12-13.

1) Sumber daya alam

Hal terpenting dalam pembangunan adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah yang digunakan di dalam ilmu ekonomi meliputi: kesuburan, letak, susunan, kekayaan hutan, iklim, sumber air, lautan dan lain-lain. Ketersediaan akan sumber daya alam yang melimpah suatu hal yang bernilai lebih dan sangat penting dalam hal pembangunan.

2) Akumulasi modal

Modal diartikan sebagai persediaan produksi yang secara fisik bisa digunakan untuk melakukan produksi. Ketika jumlah persediaan modal naik dalam jangka waktu tertentu, inilah yang kemudian disebut dengan akumulasi modal.

3) Organisasi

Di dalam pembangunan, organisasi merupakan elemen yang penting, karena erat kaitannya dengan penggunaan produksi dalam aktivitas ekonomi. Sifat organisasi sendiri lebih mengarah pada melengkapi modal, buruh dan sebagai pembantu dalam meningkatkan produktivitas.

4) Kemajuan teknologi

Perubahan pada teknologi begitu cepat menjadi hal penting harus diperhatikan di dalam pembangunan ekonomi. Perubahan teknologi ini erat kaitannya dengan perubahan pada metode produksi. Hal itu yang akan berimbas pada kenaikan produktivitas buruh, modal dan aspek lainnya.

b. Aspek non-ekonomi

Dalam aspek ini pembangunan ekonomi akan dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya: Aspek sosial dan budaya, faktor manusia, aspek politik dan administratif.⁴

1) Aspek sosial dan budaya

Pada aspek ini pasti sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Budaya pada sosial masyarakat dan pendidikan yang ada di barat memberikan dampak pada proses penalaran (*reasoning*) dan sikap keraguan (*skeptisisme*). Hal ini memberikan penanaman pada semangat yang membara hingga membuat berbagai penemuan baru yang menghasilkan sebuah pandangan baru. Aspek inilah yang merubah cara pandang, harapan, struktur serta nilai sosial masyarakat.

2) Faktor Manusia

Faktor manusia merupakan sumber daya yang sangat penting dalam melakukan pembangunan. Pembangunan ekonomi sangat tergantung pada manusianya. Kualitas pada sumber daya manusia yang ada akan menentukan bagaimana pembangunan dalam suatu daerah maupun suatu negara akan terjadi. Ketika kualitas sumber daya manusia yang dimiliki tinggi dan progresif, pembangunan bisa dilakukan dengan cepat. Di sisi lain, pembangunan tidak hanya semata tergantung pada banyaknya

⁴ Andi Famrizal, "Analisis Faktor Ekonomi dan Faktor Non Ekonomi Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi," *Jurnal Katalogis*, 8 (2017), 191.

sumber daya manusia yang ada, namun juga lebih pada efektifitas dan efisien yang merata.

3) Aspek politik dan administratif

Pada pembangunan ekonomi modern ini aspek politik dan administratif sangat membantu. Di dalam struktur politik dan pengelolaan administratif yang lemah akan sangat menghambat dalam pembangunan ekonomi negara berkembang yang terbelakang. Sedangkan pada tatanan struktur politik yang pas dan pengelolaan administratif yang bagus, kuat, efisien, efektif dan tidak korup akan memberikan dampak yang sangat besar dan bagus bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi.

B. Pembangunan Ekonomi Islam

1. Pengertian ekonomi Islam

Dalam Islam pembangunan ekonomi adalah suatu proses mengurangi kemiskinan guna menciptakan kenyamanan, ketentraman, dan etika dalam moral kehidupan. Pandangan Dr. Abdel Rahman Ahmed pembangunan merupakan sebuah perubahan struktur dalam lingkup lingkungan sosial-ekonomi secara bersamaan dengan menggunakan hukum islam dan nilai dalam etika. Ketika menggunakan bahasa Ibnu Khaldun pembangunan mempunyai arti *umran al 'alam* yang berarti pembangunan komprehensif. Seperti pernyataan Al-Jabiri: Suatu kejadian dalam sosial yang bergerak karena kelompok masyarakat yang bekerjasama dalam sebuah tatanan negara berdaulat dan mempunyai pengaruh atas tujuan pemenuhan keperluan hidup bahagia dan makmur

(rohani dan jasmani) yang bersamaan dengan implementasi ajaran agama, akhlak dan hukum aturan kejadian makhluk.⁵

Di dalam ekonomi Islam dijelaskan ilmu yang membahas kegiatan manusia dalam menggunakan sumber daya. Hal itu harus dilakukan sesuai dengan syariah Islam agar memperoleh ridha Allah. Dengan dasar ajaran bahwa kepemilikan merupakan suatu titipan dari Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan, makna kerja sebagai ibadah dan saling melakukan kerja sama menjadi suatu pembentukan atas dimensi moral dalam sistem ekonomi. Namun yang harus menjadi catatan adalah bahwa ekonomi Islam belum bisa menjadi sebuah sistem ekonomi yang telah mapan seperti halnya sistem ekonomi lain. Maka upaya terus melakukan pengembangan sangatlah diperlukan dalam mematangkan dan memantapkannya.⁶

2. Pembangunan ekonomi Islam

a. Konsep pembangunan ekonomi Islam

Dalam khazanah keilmuan peradaban Islam pembangunan ekonomi Islam sangat erat hubungannya dengan menjadikan bumi makmur. Dalam pandangan Ibnu Khaldun pembangunan erat sekali dengan *umran al-'alam*. Istilah ini mainstream dengan sosial, tamadun dan perkotaan (dalam arti luas). Tafsir lebih luas tadi ialah pembangunan yang dimaksud bukan hanya pembangunan yang bersifat

⁵ Fadlan, "Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam: Telaah Pemikiran M. Umer Chapra," *Nuansa*, 2 (2018), 411.

⁶ Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam* (Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018), 10-12

fisik, namun juga meliputi jasmani dan rohani dalam mencapai kebahagiaan dan kemakmuran seluruh manusia di dunia dan akhirat. Rasulullah pun menetapkan sebuah dasar-dasar pembangunan pada spirit dunia dan *ukhrawi* yaitu pada akhlak dan akidah sebagai semangat kerja menjadi landasan utamanya.

Dalam upaya membangun peradaban, Rasulullah meletakkan dasarnya pada: pertama, membangun masjid sebagai pusat peradaban (bukan hanya fungsi ibadah namun juga sebagai aktivitas *muamalah*). Kedua, menjalin hubungan yang baik antara kaum anshar dan muhajirin dalam mengambnagkan perdagangan dan pertanian. Ketiga, membuat kebijakan yang mengatur hak serta kewajiban masyarakat agar terwujudnya kehidupan yang aman dan damai. Keempat, mendirikan *baitul mall* sebagai pusat dalam pengelolaan dasar keuangan negara, nantinya hasil dari pengelolaan dana tersebut untuk pembangunan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan.⁷

b. Prinsip pembangunan Islam

Di dalam Islam pandangan hidup didasarkan atas pada konsep yang fundamental, yaitu: *tauhid uluhiyah*, *rububiyah*, *khalifah*, *tazkiyah an-nas*, *falah* dan *'adalah* (keadilan). Prinsip *tauhid uluhiyah* menekankan kepercayaan kepada Allah dan semua yang ada di alam merupakan milik-Nya. Dalam pembangunan sumber daya yang ada adalah miliknya dan digunakan untuk kepentingan sosial bukan hanya untuk kepentingan pribadi semata. *Tauhid rububiyyah* mengajarkan

⁷ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Gramata, 2010), 74-80.

bahwa yang menentukan keberhasilan dari perjuangan dan sukses adalah tuhan. Di dalam upaya pembangunan manusia harus menyadari bahwa tujuan mampu terealisasi atas usaha manusia yang dibarengi dengan pertolongan dari tuhan.

Pada prinsipnya manusia di ciptakan di bumi untuk menjadi *khalifah* (wakil tuhan). Merupakan sebuah amanah dari tuhan untuk selalu menjaga bumi dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dengan penuh tanggung jawab serta sebagai teladan manusia atau makhluk lain. Serta dalam *tazkiyah an-nas* manusia sebagai aktor perubahan dalam pembangunan harus mempunyai orientasi kebaikan secara sosial. Namun dalam konteks kebaikan yang dimaksud harus relevan dengan *al-falah*, kebaikan tidak hanya untuk kehidupan dunia, namun juga sebagai upaya untuk persiapan kehidupan akhirat. Namun semua prinsip tersebut hanya akan menjadi sebuah prinsip tanpa arah tanpa adanya keadilan dalam sosial ekonomi (*'adalah*).⁸

c. Tujuan Islam

Kesejahteraan (*falah*) untuk seluruh umat manusia menjadi tujuan inti Islam dalam komitmen terhadap persatuan dan keadilan. Melalui kepuasan fisik salah satu instrumen dalam tolak ukur kesejahteraan, sebab kesenangan mental (batin) dan kebahagiaan hanya bisa diaktualisasikan melalui sebuah kebutuhan materi dan rohani dari setiap individu. Oleh sebab itu, memaksimalkan *output* harus diimbangi dengan penjaminan usaha untuk kesehatan rohani. Hal ini bisa dilihat di

⁸ Tohir, "Rekonstruksi...", 28-29.

batin manusia, keadilan serta permainan yang jujur dalam lingkup segala interaksi pada manusia. Pembangunan dengan cara inilah yang selaras dengan Islam dalam tujuan syariah (*maqashid syariah*).

Pemenuhan kebutuhan spiritual menekankan pada pembangunan moral, kesenangan atas pemenuhan materi yang dilandasi dengan pembangunan manusia dan sumber daya materi dengan pola pemerataan, sehingga semua kebutuhan pada manusia bisa terpenuhi secara utuh dan distribusi dalam pendapatan harta yang adil. Karena hal itu menjadi kewajiban kolektif bagi masyarakat (muslim) untuk melakukan suatu pembinaan dan memberi kesempatan kerja. Salah satu prinsip syariah melarang menimpakan bahaya dan saling membalas bahaya kepada orang lain, maka sebuah upaya pencegahan atas sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui dan posisi terhadap lingkungan, karena keduanya sangat berbahaya dan menjadi sebuah kewajiban individu maupun kolektif untuk mencegahnya.⁹

C. Pembangunan Ekonomi Indonesia

Pembangunan ekonomi di Indonesia diartikan sebagai pembangunan yang mencakup terkait problem finansial dan materi kehidupan masyarakat. Ekonomi pancasila sebagai landasan dalam strategi pembangunan ekonomi Indonesia mempunyai tekad agar mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan sebagai dasar dan nasionalisme serta demokrasi sebagai pedoman ideal. Aspek

⁹ Mei Santi, "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal Eksyar*, 01, (2019), 52.

penting dalam konsep ekonomi pancasila yang digunakan oleh Indonesia yaitu sebuah partisipasi dan demokrasi pembangunan ekonomi daerah, nasionalisme ekonomi dan pendekatan dengan multidisipliner pembangunan.

Pada tingkatannya gagasan terkait ekonomi Pancasila masih berada pada ide, moral, etika dan ideologi. Dari hal itu perlu adanya ikhtiar lebih lanjut untuk menjadikan gagasan tersebut menjadi partisi dan landasan moral dalam pengambilan keputusan secara bijaksana. Maka pembangunan tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi, namun juga mengarah pada peningkatan kualitas hidup lebih baik melalui pemerataan dan keadilan sosial. Syarat pasti dalam menjalankan ekonomi yang berkeadilan melalui kedaulatan politik. Posisi ini menjadikan menyoal ekonomi Indonesia ke depan adalah pembangunan internal, yaitu untuk kemakmuran rakyat dengan melakukan diplomasi pembangunan perekonomian pada seluruh negara dunia.¹⁰

Dalam rumusan gagasan ekonomi pancasila yang memiliki tujuan didasarkan pada sila ke 5 pancasila, tujuan dari pembangunan ekonomi Indonesia sendiri sebenarnya masih menjadi sebuah dialektika. Namun secara universal menurut pendapat tokoh dan pakar tujuan pembangunan ekonomi ada tiga, yaitu: kecukupan, jati diri dan kebebasan dari menghamba.

1. Kecukupan (*sustenance*). Dalam hal ini, yang dimaksud kebutuhan tidak hanya menyangkut pangan, tetapi menyangkut segala hal kebutuhan dasar dari manusia secara material atau fisik. Arti dari kebutuhan yang dimaksud

¹⁰ Ahmad Faqih, "Analisis Pemikiran The Kian Wie Tentang Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 36-37.

adalah ketika hal tersebut tidak terpenuhi akan menghentikan keberlanjutan kehidupan seseorang. Kebutuhan ini meliputi sandang, pangan dan papan. Serta hal lain juga menyangkut kesehatan dan keamanan.

2. Jati diri (*self esteem*). Dorongan untuk maju, menghargai, kepantasan dan kelayakan dari diri sendiri merupakan komponen umum dari kehidupan yang baik. Pembangunan yang dilakukan harus mampu mengangkat derajat dan harkat manusia serta menciptakan iklim penumbuhan jati diri.
3. Kebebasan (*freedom*). Kebebasan dari menghamba adalah nilai umum yang harus dimiliki dalam arti pembangunan. Itulah yang disebut dengan kemerdekaan atas diri sendiri pada manusia. Kemerdekaan disini harus diartikan secara komprehensif sebagai kapasitas diri agar mampu berdiri sendiri sehingga tidak mudah untuk diperbudak oleh aspek materiil, karena pembangunan harus melepaskan diri dari rantai belenggu dari kebodohan, kemelaratan dan alam.¹¹

Ketiga hal diatas merupakan tujuan pokok yang harus diperoleh oleh setiap masyarakat dalam pembangunan. Semua itu erat kaitannya dengan kebutuhan manusia secara fundamental yang diwujudkan dalam berbagai manifes budaya dan masyarakat sepanjang zaman. Selain itu juga sebagai dasar dari corak kebijaksanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh masyarakat.

¹¹ Ibid, 38-39.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Berdasar jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu sebuah metode dalam penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi memanfaatkan bantuan dari sumber material pada buku dan sumber pustaka lain yang relevan dengan pembahasan.¹ Adapun pendekatan yang dilakukan menggunakan deskriptif analisis, yaitu sebuah metode yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan gambaran secara objektif dan sistematis mengenai data dan fakta dari berbagai sumber yang saling berkaitan dengan tema pembahasan yang kemudian dianalisis untuk mampu mencapai pemahaman dan interpretasi data.² Maksudnya dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif dan kongkrit tentang pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin.

B. Data dan sumber data

Penelitian ini memperoleh data pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin dengan cara membaca, mengutip dan menyusun dengan berdasar data atau informasi yang didapat dari kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel, esai dan lain sebagainya. Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud berupa karya dari pemikiran Ma'ruf Amin yaitu:

¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 9.

² Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

Ma'ruf Amin Way dan karya dari M. Umer Chapra yaitu: *Islam and Economic development* diterjemah ke dalam bahasa Indonesia "*Islam dan Pembangunan Ekonomi*". Selanjutnya data sekunder yang dimaksud yaitu buku, jurnal, artikel, esai atau karya ilmiah lain berupa gagasan maupun pemikiran tokoh yang ditulis tokoh maupun diulas oleh orang lain di mana karya tersebut masih relevan dengan pembangunan ekonomi.

C. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian kepustakaan, peneliti mengumpulkan data melalui metode dokumentasi. Dengan metode ini cara mengumpulkan data didapatkan dari hasil catatan penting atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga data yang didapat bukan berasal dari persepsi subjektif individu.³ Pada perihal ini peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin serta karya lain yang sinkron dan relevan dengan pembahasan tersebut.

D. Teknik pengecekan keabsahan data

Berdasarkan perspektif filsafat ilmu, keabsahan dari pemikiran tokoh bisa dianalisis dari cabang filsafat, yaitu dari sudut ontologi, epistemologi dan aksiologi. Secara pembahasan ontologi pemikiran tokoh bisa dilihat secara alamiah (apa adanya), induktif (dengan mempertimbangkan emik, etik dan verstehen (pikiran, perasaan dan motif dasar kepentingan). Secara epistemologi pemikiran tokoh dilakukan dengan menggunakan pendekatan

³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

historis, sosio kultural religius dan kritis analitis. Sedangkan secara aksiologis pemikiran tokoh bisa pandang berdasarkan nilai guna dari keteladanan (etika), bahan rujukan evaluasi bagi tokoh sesudahnya dan sumbangsih untuk perkembangan masyarakat serta dalam ilmu pengetahuan. Maka dalam hal ini peneliti mencari secara ontologi, epistemologi dan aksiologi dari pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin.⁴

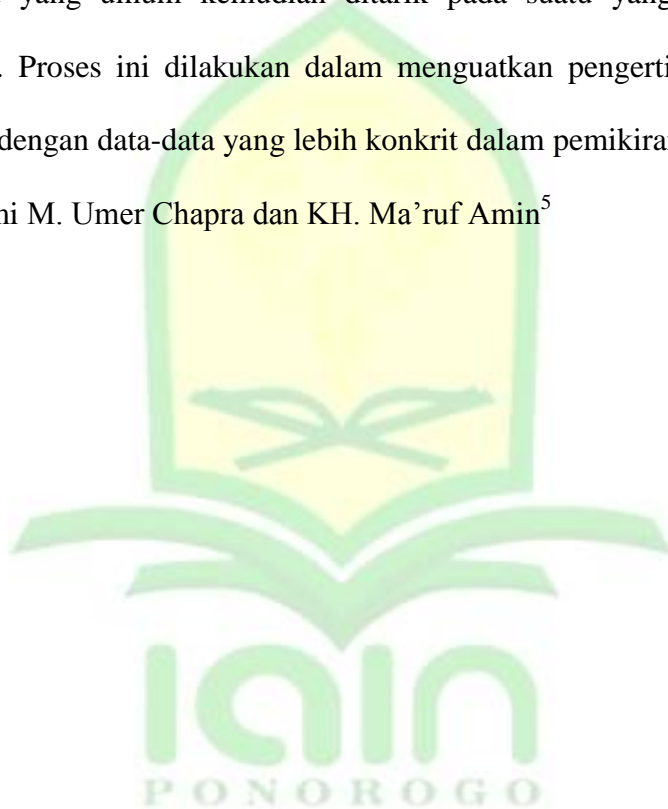
E. Analisis data

Metode yang diterapkan peneliti untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini diantaranya:

1. *Metode content analysis*, yaitu sebuah analisis yang dilakukan secara ilmiah tentang isi ataupun konten. Dalam metode ini peneliti berusaha memaparkan penjelasan sinergitas pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin menggunakan deskripsi dengan penalaran induktif-deduktif lalu ditarik pada kesimpulan.
2. *Deskriptif*, yaitu suatu metode dalam penelitian yang dipergunakan untuk menemukan sebuah pengetahuan secara komprehensif terhadap objek pada masa tertentu. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin secara sistematis mengenai konsep yang dibangun, persamaan dan perbedaannya serta relevansinya dengan pembangunan di Indonesia.

⁴ Aan Nur Hasim Ashari, "Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Kerakyatan Perspektif Ekonomi Islam Mohammad Abdul Manan," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 12.

3. *Induktif*, yaitu suatu proses penalaran dalam berfikir yang berangkat dari fakta atau peristiwa yang khusus kemudian digeneralisasi pada suatu yang umum. Hal ini digunakan untuk menarik pada kesimpulan umum dari data pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin.
4. *Deduktif*, yaitu suatu proses penalaran dalam berfikir yang berangkat dari sesuatu yang umum kemudian ditarik pada suatu yang lebih bersifat khusus. Proses ini dilakukan dalam menguatkan pengertian yang masih umum dengan data-data yang lebih konkrit dalam pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin⁵



⁵ J. Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 62.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN PEMBANGUNAN EKONOMI

M. UMER CHAPRA DAN KH. MA'RUF AMIN

A. M. Umer Chapra

1. Latar belakang kelahiran M. Umer Chapra

M. Umer Chapra atau biasa akrab dipanggil Chapra merupakan tokoh cendekiawan muslim yang lahir di Pakistan pada tanggal 1 Februari 1933. Anak dari Abdul Karim Chapra ini merupakan sosok yang dilahirkan dari keluarga yang taat dalam menjalankan agama, sehingga ketika dewasa tumbuh menjadi seorang yang berkarakter baik. Lahir dari golongan keluarga yang berkecukupan memungkinkan Chapra untuk bisa menempuh pendidikan yang baik. Semasa kecil hingga berumur 15 tahun ia habiskan waktunya di tanah tempat kelahirannya, kemudian setelah itu ia berpindah ke Karachi dengan tujuan meneruskan pendidikan sarjana sampai mampu meraih gelar Ph.D di Universitas Minnesota, AS. Pada usia 29 tahun Chapra mengakhiri status lajangnya dengan menikah dengan Khoirunnisa Jamal Mundia.¹

Karir cemerlang dalam bidang intelektualnya dimulai saat memperoleh medali emas dari Universitas Sind (1950) sebagai peringkat pertama ujian masuk dari total 25.000 mahasiswa. Pasca menempuh pendidikan dan meraih gelar S2 di Universitas Karachi (1954), karir

¹ Onny Kusuma Marhk Andika Kuncoro, "Pandangan M. Umer Chapra Tentang Upaya Menekan Inflasi Pada Tingkat Sangat Rendah Perspektif Ekonomi Islam," *Skripsi* (Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2015), 42.

dalam bidang akademiknya juga menanjak dengan diraihnya gelar doktor di Universitas Minnesota (1956). Prof. Harlan Smith selaku pembimbingnya memberikan apresiasi pujian terhadap Chapra sebagai sosok yang berkarakter dan cemerlang dalam akademis. Chapra merupakan sosok yang terkenal, selain di kalangan mahasiswa, ia juga terkenal di seluruh fakultas. Tidak hanya itu, ia juga banyak sekali terlibat di berbagai organisasi dan pusat penelitian yang berfokus pada ekonomi Islam. Peran yang dilakukannya sangat banyak di dalam pengembangan ekonomi Islam, bahkan ide gagasan cemerlang yang diberikan banyak yang tertuang di berbagai karangan karya tulis.²

2. Karya- karya M. Umer Chapra

Chapra merupakan tokoh intelektual pemikir dan praktisi dalam pemikiran ekonomi Islam. Ia adalah sosok yang mampu mengaktualisasikan karyanya dalam bentuk tulisan. Ide-idenya banyak sekali yang tertuang dalam bentuk buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Bahkan karya tulisnya sudah diterbitkan dan diterjemahkan ke bahasa lain termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Karya yang telah mampu diterbitkan terhitung sebanyak 11 buku, 9 resensi buku, 60 karya ilmiah dan masih banyak lagi artikel yang di berbagai jurnal dan media massa. Diantaranya banyaknya karya ada beberapa buku yang mendapat penghargaan dan bahkan memperoleh atensi dari berbagai pihak:

² Mohammad Zaki Su'aidi, "Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Masa Depan Ekonomi Islam," *Isyraqi*, 1 (2012), 4.

- a. Buku berjudul *Towards a Just Monetary System* yang diterbitkan oleh *Islamic Foundation* tahun 1985. Buku ini merupakan hasil dari pemikiran intelektualnya yang menjadi pondasi dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer atau modern. Selain itu buku ini juga dijadikan sebagai buku wajib di Universitas Durham, Inggris oleh Prof. Rodney Wilson karena merupakan presentasi terbaik sebagai sebuah teori dalam keuangan Islam. Dalam terjemahan ke dalam bahasa Indonesia buku ini berjudul *Sistem Moneter Islam*.³
- b. Buku *Islam and the Economic Challenge* yang diterbitkan oleh *The International Institute of Islamic Thought (IIIT)* tahun 1992. Dalam buku ini Chapra menjelaskan kelemahan dan keterbatasan konsep ekonomi kapitalisme, sosialisme dan negara sejahtera serta solusi Chapra dengan menawarkan konsep *falah* dan *hayah thoyyibah*. Selain itu di buku ini juga dijelaskan kebijakan ekonomi serta strategi pembangunan yang digagasnya tidaklah utopis, namun mampu membumi dan *operation*. Lebih lagi konsep sarat dimensi etis keagamaan tidak hanya positivisme-rasional. Dengan gagasan yang demikian tidak mengherankan ketika Prof. Kenneth Boulding menyebut karya ini sebuah analisa brilian atas sebuah kelemahan kapitalisme, sosialisme dan negara sejahtera. Di dalam *Economic Jurnal* dari Royal Economic Society, Prof. Louis Back memberikan apresiasi bahwa buku ini ditulis dengan sangat bagus dan seimbang

³ Onny, "Pandangan...", 45.

dalam literatur sintesis ekonomi Islam modern atau kontemporer. Selain itu juga masih banyak lagi apresiasi positif dari kalangan intelektual barat, salah satunya Prof. Timur Kuran (Universitas Southern California) yang memberikan rekomendasi karya Chapra sebagai sebuah panduan yang sempurna agar bisa memahami ekonomi Islam. Dalam terjemahan ke dalam, bahasa Indonesia buku ini berjudul *Islam dan Tantangan Ekonomi*.⁴

- c. Buku *Islam and The Economic Development* yang diterbitkan oleh *International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute*, Herndon, 1989. Atau dalam terjemahan ke dalam bahasa Indonesia *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Buku ini merupakan salah satu buku yang ide dan gagasannya mengenai Islam sendiri yang berasal dari presentasi paper Chapra pada seminar terkait ekonomi Islam di Kairo, september 1988. Kemudian dibenturkan dengan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan versi Islam. Selain itu buku ini juga dijadikan sebagai sumber primer dari penelitian ini terkait pemikiran Umer Chapra dalam pembangunan Ekonomi.⁵
- d. Selanjutnya buku *The Future of Economics and Islamic Perspective* yang diterbitkan oleh *The Islamic Foundation, Leicester*, 2000. Karya ini merupakan sebuah gagasan yang rinci mengenai ceramah Chapra yang disampaikan di Gedung *Islamic Development Bank*, Jeddah. Kegiatan itu dilaksanakan tgl 29 Oktober 1990 dan saat itu karyanya

⁴ Zaki, "Pemikiran...", 5.

⁵ Onny "Pandangan...", 45.

dipublikasikan sebagai monograf oleh IDB yang berjudul *what is Islamic economic?*. Buku ini bukan hanya sebagai referensi kajian ekonomi Islam namun juga menjadi sebuah dialektika perdebatan dalam ekonomi kontemporer. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia buku ini berjudul *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*.⁶

Selain karya buku yang terkenal masih ada lagi karya berupa artikel populer mengenai ekonomi Islam yang dipublish, diantaranya: *Monetary Management is an Islamic Economy*, *New Horizon*, London, 1994; *The Role of Islamic Banks In non-Muslims Countries*, *Journal Institute of Muslim Minority Affair*, 1992; *islam and the International Debt Problem*, *Journal of Islamic Studies*, 1992; *The Prohibition of Riba in Islam: an Evaluation of Some Objections*, *American Journal of Islamic Studies*, 1984, dan masih banyak karya lain baik yang *dipublish* maupun tidak di *publish*.⁷

3. Kegiatan dan karir M. Umer Chapra

Dalam hidupnya Chapra telah melakukan banyak hal baik dalam profesinya sebagai pengajar, peneliti maupun praktisi. Selama 46 tahun ia telah mengenyam banyak profesi, diantaranya: Asisten di University of Minnesota (1957 – 1960); Asisten profesor ekonomi University of Wisconsin, Platteville (1960 – 1961); Senior ekonomi dan associate editor *Development Review Pakistan*, Karachi (1961 – 1962); Ketua di bidang

⁶ Ibid., 46.

⁷ Zaki, "Pemikiran...", 6.

ekonomi Institut pusat Riset Islam, Karachi (1962 – 1963); Asisten Prof. Ekonomi University of Wisconsin, Platteville (1963 – 1964) dan Asisten Prof. Ekonomi University of Kentucky, Lexington (1964 – 1965).

Selain dari itu Chapra juga pernah menjadi penasehat dalam beberapa lembaga, diantaranya: Senior dan penasehat di Adviser ekonomi badan Moneter Arab Saudi (1965 – 1999); Penasehat riset di Islamic Research and Training Institute of Islamic Development Bank Jeddah, 1999. Tidak hanya itu beliau juga pernah menjadi juri dan editor dalam beberapa lembaga, diantaranya: *The Economic Journal*; *The Pakistan Development Review*; *American Journal of Islamic Social Sciences*; *Journal of Islam Studi Oxford University*; *Studi Ekonomi Islam (Islamabad)*, *Jurnal Ekonomi Islam*; *Jurnal Ekonomi Islam King Abdul Aziz University*; *Jurnal Studi Tujuan The Khamir Economic Review*; *Studi Ekonomi Islam Hamdard Islamicus*; *Pakistan Journal of Applied Economics and The Journal of Study Development*.⁸

Selain menjadi akademisi, penasehat dan juri Chapra juga aktif dalam pertemuan International Monetary Fund (IMF); Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC); Islamic Development Bank (IDB); International bank of Reconstruction and Development (IBRD) dan Organization of The Islamic Cooperation (OIC) serta organisasi regional dan internasional lain. Disamping itu, ia juga aktif dalam organisasi, organisasi yang pernah diikutinya antara lain: Masyarakat

⁸ Dedi Mulyadi, "Pemikiran Ekonomi Islam Umer Chapra: Studi Analisis Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, dan Negara Sejahtera," *Adliya*, 2 (2016), 171.

Ekonomi Kerajaan Inggris; American Economic Association; Masyarakat Ekonomi Saudi dan Asosiasi Ekonomi Islam.

Dalam karirnya ia sangat aktif mengisi seminar-seminar di penjuru dunia. Chapra pernah mengisi seminar di Bahrain, Mesir, Bangladesh, Pakistan, Maroko, Jepang, India, Malaysia, Kuwait, Jepang, Afrika selatan, Yordania, Arab Saudi Turki, Inggris, Spanyol dan Amerika Serikat. Ia juga tergabung dalam organisasi Lingkar Qur'an Studi dan aktif menyampaikan dalam ceramah mingguan di Jeddah dan Riyadh. Dalam karirnya ia memainkan peran yang sangat penting sebagai komite yang bertugas menelaah di dalam seminar ekonomi Islam terkhusus dalam bidang keuangan.⁹

4. Pemikiran Pembangunan Ekonomi M. Umer Chapra

Formulasi neoklasik masih tetap memperoleh tempat di negara berkembang. Untuk mendukung sebuah citra diri mereka menyebutkan negara-negara timur jauh sebagai contoh dari keberhasilannya, diantaranya: Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura yang mengikuti kebijakan liberalisasi dan orientasi untuk ekspor dalam mendorong efisiensi dan pertumbuhan. Perspektif liberalisasi mampu mempercepat pembangunan mereka dengan sebuah motivasi di sektor swasta yang lebih berperan besar. Orientasi untuk melakukan ekspor telah mendorong mereka tidak hanya meningkatkan kesempatan kerja, namun juga mampu membuat mereka dalam pemenuhan kebutuhan

⁹ M. Umer Chapra, Habib Ahmed, *Lembaga Keuangan Syariah*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2008), 221.

terkait valuta asing di perekonomian yang menggelembung serta tingkat ketergantungan relatif berkurang terhadap bantuan dari asing.¹⁰

a. Faktor keberhasilan pembangunan yang adil

Tidak diragukan bahwa orientasi pada ekspor (*outward looking*) telah berperan signifikan bagi percepatan pertumbuhan negara, akan tetapi tidak dibenarkan ketika keberhasilan ekonomi hanya disebabkan oleh faktor ini saja. Ada faktor lain yang memiliki bobot sama bahkan lebih besar dibalik keberhasilan ini, seperti intervensi pemerintah yang cukup besar, keadilan sosio ekonomi dan harmonisasi sosial yang berasal dari *land reform*, perilaku menabung dan investasi tinggi, dukungan institusi impor dan promosi ekspor yang aktif bagi industrialisasi. Hal penting dan perlu digaris bawahi, tidak semua faktor ini cocok dengan corak neoklasik, tetapi sebagian diantaranya jelas bertentangan

b. Peran pemerintah

Pemerintah negara ini telah berperan aktif melakukan intervensi dalam bentuk BUMN, regulasi, subsidi dan berbagai tindakan yang mempengaruhi pasar modal dan hampir dari segala aspek ekonomi. Pemerintah mengarahkan pelaku bisnis swasta dengan sasaran target yang ditentukan melalui perizinan, kontrol, pinjaman luar negeri dan perjanjian teknologi, penggunaan insentif selektif dan ancaman. Dengan ini sangat diragukan ketika negara dapat mencapai

¹⁰ M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani, 2000), 59.

suatu tujuan tanpa adanya peran pemerintah secara aktif dan kuat. Namun hal itu juga perlu digaris bawahi, peran pemerintah di negara ini tidak selalu restriktif melalui bentuk kontrol yang membunuh sebuah inisiatif dan mengerem laju di sektor swasta. Peran tersebut lebih bersifat positif dalam memberikan kemudahan untuk menggalakkan sektor swasta. Tentu kepemimpinan secara pragmatis dengan berorientasi dan berdedikasi pada pertumbuhan di negara yang mampu mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan keinginan rakyat, serta stabilitas pemerintah telah mengikis pada ketidakpastian dan memberikan keyakinan investor.¹¹

c. *Land reform* dan pembagian kekayaan

Land reform ini terjadi di negara timur tersebut pasca perang dunia II oleh otoritas pendudukan dengan menghapuskan baik secara psikologis dan materi tuan tanah yang menjadi penggerak negara tersebut menyulut perang. Imbas dari reformasi ini berdampak secara signifikan dalam mempersamakan distribusi pendapatan di desa dan ikut dalam menjaga perbedaan pandangan kota dan desa sehingga lebih sempit dari negara lain. Dari hal tersebut, *land reform* memanglah sangat luas, karena dengan hal itu mampu menghancurkan kekuatan kaum feodal dan meniadakan penyewaan tanah pertanian (*farm tenancy*) yang sebelumnya berkembang sangat luas. Secara fundamental, *land reform* menyebabkan tuan tanah merasa dirampas

¹¹ Aryu Inayati, Anindya. "Pemikiran Ekonomi Islam." *Profetika*, 2 (2013): 168-169.

karena tidak diberikan hak kompensasi atau meski diberi namun tidak seberapa.

Pembentukan lembaga besar yang terdiri dari petani kecil, pemilik tanah independen sebagai pengganti kelas kaya yang sedikit jumlahnya dan tuan tanah yang tidak populer mampu mengubah keseimbangan politik dengan keberpihakan pada kaum mayoritas petani kecil. Mereka memiliki kekuatan politik baru yang dapat digunakan menyusun kepuasan yang memihak pada kepentingannya, karena pada dasarnya pemerintah juga perlu dukungan sehingga pada waktunya pemerintah harus bersedia memberikan perlindungan kepada pertanian dan pengembangan infrastruktur desa.¹²

d. Pemerataan sosial

Keuntungan lain yang diterima dari *land reform* yaitu pemerataan sosial lebih besar. Hal tersebut telah mengurangi dorongan untuk konsumsi pamer diri dan investasi yang dilakukan orang kaya ketika ketidakmerataan terjadi. Selain itu dorongan untuk menggunakan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan orang miskin sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Pendidikan tinggi dan angkatan kerja baik mampu membangun suatu pondasi kokoh bagi pertumbuhan lebih cepat dan seimbang. Berkurangnya penderitaan si miskin telah mampu menghapuskan

¹² Saparuddin, "vitalisasi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kemandirian Perekonomian Umat," *Al-Iqtishad*, 01 (2021), 28.

penyakit anti sosial dan meningkatkan motivasi kerja, efisiensi dan reduksi kekosongan karena pemogokan dan konflik.¹³

e. Padat karya

Untuk memperkuat tujuan pemerataan kebijakan untuk menggunakan teknik padat karya untuk meredam problem pengangguran. Kebijakan tidak memperbolehkan konglomerasi melakukan bisnis domestik memperoleh dukungan kepada teknik padat karya untuk mereduksi pengangguran dan problem konstan di negara industri dan berkembang, tetapi disisi lain juga sudah memberikan petani kecil peluang yang bagus untuk pendapatan di desa. Perolehan prestasi kesempatan kerja secara penuh di pedesaan dan perkotaan telah menambah pendapatan keluarga dan lebih meningkatkan pada pemerataan pendapatan sebagai dari konsekuensi *land reform*.

f. Nilai-nilai kultural

Nilai kultural negeri dan homogenitas sudah membantu mendorong pertumbuhan masyarakat sehingga terwujud stabilitas sosial dan kedamaian. Sistem ini berpusat pada kewajiban orang tuanya, bos dan karyawan, sahabat, tetangga serta masyarakat. Pemenuhan atas kewajiban ini harus dilakukan agar seseorang bisa diterima sebagai satu unsur dalam anggota masyarakat, karena ketika menolak konsekuensi yang harus diterima adalah pengusiran sosial. Di masyarakat yang menempatkan sebuah kewajiban posisi yang

¹³ Ibid., 29.

penting, maka dibutuhkan disiplin sangat kuat, sikap ramah kepada karyawan dan perhatian akan kesejahteraan. Begitupun juga karyawan, harus bekerja keras, jujur dan harmonisasi hubungannya terhadap majikan. Nilai sosial dalam memelihara kepentingan di bawah kontrol untuk memenuhi kepentingan sosial saat keduanya tidak terintegrasi sangat bertentangan dengan liberalisasi ekonomi neoklasik bebas nilai.

g. Kontrol impor dan promosi ekspor

Selain mendorong tabungan, nilai kultur juga secara nilai telah menghambat impor barang yang kurang diperlukan. Banyak negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan nasional dilakukan tarif impor yang tinggi dan kontrol nilai tukar ketat sehingga berimbas pada penyelundupan, manipulasi data pengiriman barang serta korupsi. Hal tersebut dalam sebagaimana negara berkembang bisa diatasi dengan norma sosial yang tidak memeungkinkan dilanggar tanpa dihukum secara sosial. Efeknya perekonomian lebih berorientasi keluar (ekspor) bukan impor, meskipun dalam kebijakan kontrol impor yang ketat telah ditiadakan namun mereka tetap lebih menonjolkan ekspor.¹⁴

Namun di sisi lain, menurut M. Umer Chapra dibutuhkan sebuah strategi yang mampu digunakan agar pembangunan ekonomi mampu dilakukan sesuai dengan Islam. Hal tersebut harus memperhatikan

¹⁴ Chapra, Islam..., 64-67.

elemen strategis dan kebijakan negara yang seharusnya sesuai dengan pandangan Islam.

a. Elemen strategis

1) Pemerataan penyaringan klaim berlebih

Problem yang dihadapi masyarakat dalam mengimplementasikan sasaran egalitarian adalah bagaimana menyaring klaim yang tidak terbatas terhadap sumber daya terhadap klaim yang lolos hanya yang diakui efisien dan pemerataan saja. Mekanisme harga memang tidak bisa bertindak sebagai filter, namun itu tidak beroperasi dengan pola yang merata. Dari hal tersebut Islam melengkapi dengan satu filter yang menjamin pemerataan. Dalam konsepnya, saringan moral langsung menyerang kepada kesadaran individu terdalam dengan mengubah skala preferensi agar mengikuti prioritas sosial dan membuat suatu klaim untuk fungsi kesejahteraan manusia.¹⁵

Konsep tersebut akan mampu meminimalisir atas klaim yang tidak adil dan esensial dari perspektif sasaran sosial. Penyertaan filter ini akan memberikan sebuah implikasi evaluatif untuk klaim sumber daya berdasarkan nilai moral yang diekspresikan di dalam pasar. Ketika semua klaim lolos dari saringan moral, maka klaim tidak penting dan esensial bisa diminimalisir atau bahkan dieliminasi. Dengan begitu filter harga

¹⁵ Chapra, Islam..., 80.

akan bekerja lebih efektif untuk mewujudkan alokasi sumber daya yang adil dan efisien.¹⁶

2) Motivasi

Masalah selanjutnya adalah ketika meyakinkan untuk memotivasi individu dalam melayani kepentingan sosial berjalan dengan filter moral walau berbuat demikian merugikan kepentingannya. Hal ini muncul karena pada dasarnya setiap individu ingin melayani kepentingannya sendiri dan ketika mereka tidak melakukan hal itu perilaku mereka tidak akan bisa kondusif dalam merealisasikan efisiensi yang optimal penggunaan sumber daya. Dalam mewujudkan harmonisasi kepentingan individu dan sosial harus dipersiapkan, sehingga mampu menuju pada melayani kepentingan sosial hakikatnya melayani kepentingan individu (dalam pendekatan Islam).

Pandangan mengenai pertanggung jawaban kepada Allah mampu sebagai fungsi kekuatan dalam memberikan motivasi yang kuat bagi individu dalam menjalankan nilai moral serta mencegah mereka dari mengumbar nafsu pada batas norma sosial dan kesejahteraan. Teori Adam Smith persaingan dan kekuatan pasar memang mampu menjalankan fungsinya dan bisa berperan secara komplementer, namun tidak akan cukup efektif dalam menjamin kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif.

¹⁶ Fadlan, "Rekonstruksi...", 413.

Hal itu disebabkan karena persaingan bisa bersifat tidak sehat dan kepentingan sendiri lebih bersifat duniawi dan bebas dari ajaran nilai moral.¹⁷

3) Restrukturisasi sosioekonomi

Banyak kasus di dalam masyarakat yang bermuatan moral pun, individu cenderung untuk tidak mengindahkan masalah kelangkaan dan prioritas sosial dalam mengalokasikan sumber daya ketika keadaan sosio ekonomi sedang tidak kondusif. Kemungkinan mereka tidak menyadari bahwa kebutuhan orang lain lebih urgen dan belum bisa dipenuhi. Meskipun mereka berbuat, secara tidak sadar ada kemungkinan telah terbawa pada arus (kecenderungan) sosial yang kurang sehat dan terpalang dari sumber daya yang terbatas dari pemenuhan kebutuhan orang lain sehingga lebih mengarah pada keinginan mereka yang tidak begitu urgen. Karena itu perlu adanya restrukturisasi dengan tujuan: transformasi manusia dalam pembangunan agar mampu berperan aktif dan konstruktif dalam alokasi sumber daya yang merata dan efisien, mereduksi kepemilikan sarana produksi yang sedang berjalan guna melengkapi fungsi transformasi moral untuk meminimalisir pengaruh atas kekuasaan dan kekayaan dan distribusi sumber daya, meminimalisir bahkan eliminasi konsumsi berlebihan dalam swasta maupun pemerintah guna meningkatkan tabungan dan memperbesar sumber daya yang ada ke arah investasi

¹⁷ Chapra, *Islam...*,81-82.

serta pemenuhan kebutuhan dan reformasi sistem keuangan sehingga mampu berperan secara komplementer.¹⁸

4) Peran negara

Restrukturisasi tersebut tidak akan bisa direalisasikan secara efektif ketika semua kekuatan yang terlibat tidak bekerja sama. Maka pemerintah harus memberikan peran positif yang berorientasi sasaran ekonomi. Peran yang dimaksud hanya bersifat komplementer yang diaktualisasikan melalui internalisasi nilai Islam dalam suatu masyarakat, menciptakan iklim sehat sosioekonomi, pengembangan suatu institusi yang tepat dan bukan terhadap kebebasan individu yang tidak perlu dan hak memiliki properti.¹⁹

b. Tindakan kebijakan

1) Kenyamanan kepada faktor manusia

Manusia merupakan sumber daya yang harus diperhatikan, karena mereka merupakan suatu sasaran serta tujuan pembangunan, apabila tidak dibekali secara tepat agar bisa memberikan sebuah kontribusi positif kepada pembangunan serta kepentingan atas dirinya tidak dilindungi pada batas kesejahteraan sosial, maka tidak mungkin bisa merealisasikan tujuan inti Islam dalam pembangunan. Dari hal tersebut, maka tugas yang menjadi tantangan oleh setiap negara muslim adalah memberikan motivasi

¹⁸ Ibid, 83.

¹⁹ Fadlan, "Rekonstruksi...", 414.

kepada manusia untuk bisa merealisasikan kepentingan pembangunan yang adil.

Motivasi untuk individu agar memberikan yang terbaik dengan cara bekerja keras dengan efisien disertai karakter integritas, disiplin, jujur dan kalau memang diperlukan berkorban mengatasi hambatan di dalam perjalanan melakukan pembangunan. Selain itu, mereka juga harus membiasakan untuk mengubah pola konsumsinya dengan budaya menabung dan investasi sesuai dengan keperluan agar mampu meningkatkan pertumbuhan dengan didasarkan pemerataan lebih besar dan ketidakseimbangan kecil. Namun perlu ditekankan, motivasi itu tidak akan bisa memadai ketika tidak diikuti potensi terbaiknya. Maka harus diikuti dengan kemampuan dalam menggunakan teknologi dan metode manajerial yang baik. Dalam konsensus ini menuntut diadakannya pelatihan memadai dan akses keuangan. Ketika hal ini tidak direalisasikan, motivasi yang dilakukan tidak akan mendekati pada sistem ekonomi pada realisasi potensi yang optimal bagi manusia.²⁰

2) Mengurangi konsentrasi kepemilikan

Hambatan yang dianggap paling serius untuk merealisasikan pembangunan yang adil ialah konsentrasi kepemilikan atas sarana produksi di negara Islam, seperti seluruh perekonomian yang membuat rugi pasar. Ketika hal ini tidak diubah dengan tindakan yang radikal berdasar syariat Islam, maka

²⁰ Chapra, Islam..., 85-86.

tidak akan mungkin membuat kemajuan dalam merealisasikan egalitarian ekonomi dalam Islam. Tentunya strategi yang dipakai Islam harus berbeda dengan strategi sosialisme dalam menghapus ketidakadilan distribusi kapitalisme. Karena strategi yang dipakai sosialisme telah menurunkan harkat dan martabat manusia pada perbedaan upah permanen dan membunuh sebuah inisiatif serta semangat individu untuk usaha dengan kolektif berdasar sarana produksi dan sentralisasi dalam pembuatan keputusan.

Perluasan dalam kepemilikan serta desentralisasi dalam pembuatan keputusan lebih terlihat seiring dengan kebebasan dan martabat sebagai *khalifah* yang diberikan Allah kepada manusia. Hal ini harus mampu dilakukan baik pada lingkup pedesaan maupun perkotaan, sektor pertanian maupun industri, serta perdagangan melalui jalur sebuah reformasi pertahanan dan pembangunan pedesaan (perluasan industri makro dan kecil, perluasan kepemilikan, kontrol perusahaan besar, pengaturan aturan zakat Islam, hukum warisan serta reorganisasi sistem keuangan dalam perspektif Islam).²¹

3) Restrukturisasi ekonomi

Konsep dari realokasi sumber daya yang diperlukan melakukan pembangunan secara merata tidak akan bisa berjalan tanpa adanya penataan kembali ekonomi dalam segala aspek. Adapun hal yang direlokasi lebih lanjut untuk merealisasikan hal

²¹ Ibid., 97.

tersebut diantaranya: a). Mengubah preferensi konsumen, b). Reformasi keuangan pemerintah, c). Restrukturisasi iklim investasi, d). Produksi yang didasarkan atas kebutuhan, e). Dan melakukan pendekatan baru bagi pengangguran,

4) Restrukturisasi finansial

Terkadang orang menjadi miskin bukan karena ia tidak adanya usaha dalam melakukan kerja keras dan kurang keterampilan, akan tetapi mereka telah melakukan kerja keras dan memiliki keterampilan yang lebih baik dari orang yang kaya. Problem utamanya adalah mereka tidak punya akses sumber daya finansial yang mencukupi untuk berwirausaha atau karena upah yang diterima tidak cukup untuk kebutuhannya, apalagi untuk menabung. pembiayaan usaha dijadikan sebagai senjata yang kuat dalam ekonomi sosial dan politik dan memiliki peran sangat penting dalam menentukan basis kekuatan, status sosial dan status sosial di dunia modern.

Penggunaan atas sistem finansial Islam bisa lebih kondusif dalam melakukan kontrol terhadap kemampuan dan membawa industri kecil mikro menghasilkan *output* dan penciptaan lapangan kerja serta distribusi pendapatan. Resiko yang ditanggungkan disertai dengan imbalan oleh lembaga keuangan secara substansi akan mengurangi ketidakpastian dari usaha kecil. Hal itu akan menyelamatkan dari beban membayar bunga di masa sulit. Islamisasi bank serta pembiayaan industri kecil dan mikro akan

membantu dalam menggalakkan program menabung masyarakat desa yang belum mampu diserap karena adanya ketidakpercayaan terhadap bank yang memiliki bunga dan sikap apatis dari bank sendiri. Hal ini akan mengakomodir tabungan dari masyarakat yang menganggur dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih, namun juga akan berakibat pada inflasi. Namun dengan hal ini akan mengurangi daya ketertarikan terhadap emas sebagai suatu cara penyimpanan nilai dan beralih pada tabungan dengan berinvestasi.²²

5) Perencanaan kebijakan strategis

Negara muslim atau mayoritas muslim tidak akan bisa menggunakan keterbatasan sumber daya terbatas secara benar dan efektif ketika tidak ada suatu perencanaan yang strategis dalam persiapan jangka panjang. Dalam perencanaan ini tidak perlu menyeluruh, namun mencoba mencapai suatu keseimbangan antara *input* dan *output* serta alokasi unit mikro dengan jaringan kontrol peraturan. Kebijakan yang perlu dilakukan oleh negara muslim yaitu dengan meloloskan klaim sumber daya melalui mekanisme filter nilai Islam, motivasi dan aktivasi sektor swasta melalui reformasi moral serta insentif ekonomi. Selain itu juga penggunaan sumber daya langka secara efisien dan optimal serta melakukan pemerataan.²³

²² Ibid., 142-143.

²³ Ibid., 147-149.

Berdasarkan data di atas secara ringkas pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra memandang suatu pembangunan ekonomi tidak hanya membangun dari sisi pertumbuhan ekonominya, namun juga adanya pembangunan moral dari dalam diri manusia atau individu sendiri. Di dalam gagasannya yang digambarkan melalui pembangunan yang adil di timur, ia mempunyai pandangan bahwa liberalisasi dan orientasi ekspor memang mempunyai peran yang penting bagi pertumbuhan negara, namun dibalik itu ada faktor lain yang bisa dikatakan mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut. Seperti adanya peran pemerintah (intervensi pemerintah), keharmonisan sosioekonomi yang disebabkan *land reform* dengan dasar nilai sosial (pembagian kekayaan dan pemerataan), budaya (kecenderungan) menabung dan investasi tinggi, support positif dalam substansi melakukan impor dan peningkatan promosi ekspor untuk industri.²⁴

Selain itu, hal penting melalui pendekatan strategis Islam dalam upaya melakukan pembangunan ekonomi sangat perlu diperhatikan. Dengan melakukan penyaringan melalui filter moral akan mampu mewujudkan sebuah pemerataan dan klaim yang berlebihan terhadap aset kekayaan. Di sisi lain sebuah motivasi untuk menekankan pelayanan kepentingan sosial yang secara hakikat juga melayani kepentingan individu sangat perlu untuk digencarkan agar mampu menciptakan keharmonisan sosial. Upaya restrukturisasi dan peran aktif negara akan

²⁴ Chapra, *Islam...*, 59-66.

lebih mampu menjadikan manusia berperan aktif dan konstruktif dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dengan tujuan keadilan secara utuh.²⁵

Namun pendekatan itu tidak bisa semata-mata hanya menjadi sebuah konsep yang tidak memiliki imbas ketika tidak dipertegas dengan kebijakan yang harus dilakukan oleh suatu negara Islam atau mayoritas muslim. Adapun kebijakan yang bisa diajukan menurut Chapra adalah dengan memberikan kenyamanan kepada sumber daya manusia, mereduksi konsentrasi kekayaan, restrukturisasi ekonomi dan keuangan serta melakukan rencana kebijakan strategis. Namun diantara itu semua injeksi moral ke dalam parameter pembangunan materiil merupakan suatu hal yang lebih penting karena dengan begitu akan lebih mampu mewujudkan pemerataan dan efisiensi bagi pembangunan yang berkeadilan.²⁶

B. KH. Ma'ruf Amin

1. Latar belakang dan karir KH. Ma'ruf Amin

Ma'ruf Amin atau yang lebih dikenal sebagai ulama dipanggil KH. Ma'ruf Amin merupakan tokoh ulama', politisi dan juga dosen yang lahir di Tangerang pada 11 Maret 1943.²⁷ Ia menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat dan Madrasah Ibtidaiyah di Kresek, Tangerang (1955). Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang (1958 –

²⁵ Ibid., 80-83.

²⁶ Ibid, 85-147.

²⁷ Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden "Wakil Presiden RI," dalam <https://www.presidentri.go.id/wakil-presiden-maruf-amin/>, (diakses pada tanggal 20 Oktober 2021, jam 18.03).

1961). Kemudian ia melanjutkan pendidikan di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, Jawa Barat. Setelah menempuh pendidikan di perguruan tinggi, ia melanjutkan tugas dakwah yang bertempat di Jakarta.

KH. Ma'ruf Amin mendapatkan gelar doktor sebagai kehormatan (doktor honoris causa) penganugerahan yang diberikan oleh Prof. Dr. Komarudin Hidayat selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah pada tanggal 5 Mei 2012. Gelar ini layak diberikan kepada Ma'ruf Amin karena beliau merupakan seorang ulama' yang sangat cemerlang di bidang Ilmu Ekonomi Syariah dan juga merupakan penggerak ekonomi syariah Indonesia. Sedangkan KH. Ma'ruf Amin diberikan gelar profesor atau guru besar bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Penganugerahan gelar ini dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) melalui sidang terbuka pada Rabu, 24 Mei 2017.²⁸

Selain itu dalam perjalanan cintanya dimulai dari pernikahan dengan Siti Churiyah selama 49 Tahun dan memiliki 8 anak dan 13 cucu. Pada usia 67 tahun ia ditinggal Churiyah tepat pada tanggal 22 Oktober 2013. Di tujuh bulan kemudian ia menikah lagi dengan Wury Estu Handayani (seorang janda sekitar 2 tahun) di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat pada 31 Mei 2014.

²⁸Kumparan News, "Ma'ruf Amin dan Gelar Profesor Doktor Bidang Ekonominya," dalam <https://kumparan.com/kumparannews/ma-ruf-amin-dan-gelar-profesor-doktor-bidang-ekonominya-1533814983435184869/2>, (diakses pada tanggal 17 Oktober 2021, jam 19.07).

2. Karya-karya dari KH. Ma'ruf Amin

Karya maupun gagasannya sangat banyak yang itu semua merupakan pandangannya mengenai realitas maupun peristiwa yang terjadi. Namun pandangan atau gagasan mengenai ekonomi ia mulai ketika ia menjabat sebagai MUI. Karya terkait pemikiran Islam diantaranya: Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, Melawan Terorisme dengan Iman dan Prospek Cerah Perbankan Islam. Karya tersebut merupakan sebuah terobosan dalam menjawab problem yang dihadapi masyarakat, karena tidak semua problem yang muncul sudah ada solusinya maka perlu dilakukan sebuah ijtihad.²⁹

Selanjutnya karya ataupun pemikiran ekonomi dari KH. Ma'ruf Amin dituangkan dalam buku *Macroeconomics* dan *The Ma'ruf Amin Way*. Buku *Macroeconomics* merupakan gagasan pertamanya mengenai arah dan tujuan ekonomi Indonesia ke depan yang ditulis oleh Nurdin Tambolon. Dalam buku ini mempunyai fundamental pemikiran dalam membuat ekonomi lebih baik melalui sinergitas ekonomi bawah dan atas.³⁰ Buku kedua yang berjudul *The Ma'ruf Amin Way* merupakan pemikiran ekonominya yang ditulis oleh Sahala Panggabean (pakar koperasi) dan Anwar Abbas (sekjen MUI). Buku ini merupakan sebuah pemikiran dan perjalanan berdasarkan karir Ma'ruf Amin sebagai Ulama,

²⁹ Kompas, "Ma'ruf Luncurkan Tiga Buku Keislaman," dalam <https://nasional.kompas.com/read/2008/09/10/17412844/Maruf.Luncurkan.Tiga.Buku.Keislaman>, (diakses pada tanggal 21 Oktober 2021, jam 09.00).

³⁰ Gilang Akbar Prambadi, "Pemikiran Ma'ruf Amin Dituangkan Ke Buku Bertema Ekonomi," dalam <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/ppty9b456/pemikiran-maruf-amin-dituangkan-ke-buku-bertema-ekonomi>, (diakses pada tanggal 21 Oktober 2021, jam 09.54).

pengajar, Politisi maupun ahli dalam perekonomian (sebagai anggota Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah Indonesia).³¹

3. Kegiatan dan karir KH. Ma'ruf Amin

Pada tahun 1971 dengan keadaan organisasi masyarakat (ormas) Nahdlatul Ulama' (NU) masih menjadi partai politik Ma'ruf Amin diberi mandat dan terpilih menjadi salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya di tahun 1977 ia terpilih dan menjabat menjadi salah satu anggota DPRD DKI dari fraksi PPP dalam satu periode (1977 – 1982). Di akhir masa periode, ia kembali mengabdikan ke kampus dan meneruskan menjadi aktivis sosial. Di tahun 1989 ia diamanahi sebagai *katib 'aam* yang menempati posisi sebagai senior di syuriah NU atau Dewan Pemimpin Tertinggi.

Pada tahun 1998 dengan jatuhnya Soeharto, Ma'ruf Amin menjadi penasihat Abdurrahman Wahid di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan masa kepresidenannya selama 3 tahun (1999 – 2001). Ma'ruf Amin kembali aktif dalam dunia politik mewakili partai PKB dalam DPR RI (1999 – 2004). Di kursi DPR selama masa jabatan kedua ia sebagai Ketua Komisi IV (pertanian, pangan dan kelautan) dan anggota Komisi II (urusan pemerintahan dan otonomi daerah) serta Dewan Anggaran. Selama itu juga ia pernah menjadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama

³¹ Dewi Andriani, "Ma'ruf Amin Way: Mengenal Lebih Dekat Pemikiran Umat ala Ma'ruf Amin," dalam <https://kabar24.bisnis.com/read/20191006/15/1155818/maruf-amin-way-mengenal-lebih-dekat-pemikiran-ekonomi-umat-ala-maruf-amin>, (diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 jam 10.01).

yang mempunyai wewenang dalam mengeluarkan fatwa (pendapat hukum).

Masa selanjutnya ia tidak ikut dalam pemilihan kembali ke bangku DPR dan memilih kembali ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pimpinan Dewan Syariah Nasional (2004 - 2010). Ia juga pernah menduduki posisi penasehat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (2007 – 2014). Selanjutnya di tahun 2015 ia menggantikan Mustofa Bisri sebagai *'aam syuriah* NU dalam kongres NU ke -33, kemudian ia terpilih sebagai Ketua MUI menggantikan Din Syamsudin. Dan di tahun 2019 sampai sekarang, ia terpilih menjadi wakil dari Presiden RI, Joko Widodo.³²

4. **Pemikiran Pembangunan Ekonomi KH. Ma'ruf Amin**

Di dalam konsep yang dibawa, Ma'ruf Amin mendasarkan atas tiga prinsip (keadilan, keumatan dan kedaulatan. Berangkat dari ketiga prinsip yang terintegrasi akan mampu menciptakan kesejahteraan bagi Masyarakat. Pada konsep keadilan didasarkan atas ekonomi moral yang mempunyai semangat nilai keagamaan, keadilan sosial dan kemanusiaan. Selanjutnya ekonomi keumatan yang didasarkan atas semangat kerakyatan (demokrasi ekonomi) yang orientasinya berpihak pada rakyat. Dalam prinsip ekonomi kerakyatan didasarkan atas landasan kemitraan, persatuan dan musyawarah. Terakhir adalah kemandirian atau kedaulatan

³² Wikipedia, "Ma'ruf.....".

ekonomi yang mengandung semangat nasionalisme ekonomi dengan memegang prinsip mandiri dan memberdayakan yang lemah.³³

a. Ekonomi berkeadilan

Prinsip pembangunan ekonomi dari Ma'ruf Amin yang pertama adalah keadilan. Mengutip dari ide Bung Hatta, keadilan merupakan kesetaraan dan hilangnya kezaliman.³⁴ Dalam artian setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan sama. Namun ini berbeda dengan konsep liberalisme yang lebih cenderung menyamaratakan tanpa melihat sosial konteks sehingga kaya dan miskin diperlakukan dengan sama. Arti adil sendiri tidak cukup hanya mempunyai sebuah kedudukan yang sama, namun juga harus ada pembelaan terhadap yang lemah sehingga tidak terzalimi oleh yang lebih besar.

1) Filosofi ekonomi keadilan

Dalam Pancasila di sila ke 3 dan ke 4 merupakan cara dalam mencapai keadilan sosial (sila ke 5 Pancasila) melalui nasionalisme ekonomi dan demokrasi ekonomi. Hal ini harus dilandasi dengan ekonomi moral (sila ke 1) dan kemanusiaan (sila ke 2). Dengan begitu sudah sangat jelas agar bisa mencapai keadilan negara harus memegang prinsip ekonomi berdasar Pancasila dan UUD 1945. Kondisi dalam struktur sosial di Indonesia masih berbentuk piramida yang digunakan mengukur kesenjangan pendapatan. Keadaan masyarakat kaya masih sedikit

³³ Sahala Panggabean, Anwar Abbas, *The Ma'ruf Amin Way* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), 119-125.

³⁴ Adi Sasono, *Rakyat Bangkit Bangun Martabat* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), 219.

dibanding dengan masyarakat miskin uang ini diakibatkan ketidakadilan ekonomi.³⁵

Berdasarkan riset yang telah dilakukan Mubyarto, otonomi daerah diharapkan membawa distribusi ekonomi daerah tidak memberikan hasil yang signifikan. Menggunakan metode dengan menghitung PDRB per kapita dibanding tingkat konsumsi perkapita, maka akan terlihat kesenjangan. Dari riset tersebut ditemukan sebuah hasil bahwa perekonomian daerah sudah dibawa investor luar negeri.³⁶ Guna menciptakan keadilan maka harus diubah struktur sosial yang digambarkan dari piramida menjadi ketupat. Agar struktur sosial menjadi ketupat, maka harus memperbesar populasi di masyarakat kelas menengah (*middle class*). Bahkan ketika keadilan sosial mampu diterapkan, maka tatanan masyarakat tidak hanya sampai pada ketupat, tetapi menjadi gunung wayang. Keadaan ini menggambarkan struktur sosio ekonomi masyarakat tidak ada lagi orang yang miskin melainkan lebih dominan kelas menengah dan sedikit kelas kaya.³⁷

2) Landasan ekonomi keadilan

Landasan ini didasarkan atas empat hal. Pertama, nilai keagamaan. Sebagai bangsa yang religius, nilai spiritual perlu ditekankan agar menjadi fondasi aktivitas ekonomi. Salah satu

³⁵ Sahala, Abbas, *The Ma'ruf...*, 139.

³⁶ Mubyarto, *Revolusi Menuju Sistem Ekonomi Pancasila* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2004, 7.

³⁷ Sahala, Abbas, *The Ma'ruf...*, 140-141.

menjadi penyebab ketimpangan sosio ekonomi dan ketidakadilan di masyarakat ialah adanya penyimpangan atas moral yang dilakukan segelintir orang sehingga hal tersebut menjadi tanggungan orang lain. Karena itu, prinsip fundamental keadilan adalah dengan mengamalkan nilai keagamaan dalam perilaku ekonomi masyarakat. Manusia yang memiliki kepercayaan terhadap tuhan akan berperilaku tidak materialistik dan tidak serakah dan tanggung jawab atas pengelolaan bumi sebagai tugas *khalifah fil ard*.

Kedua, keadilan yang berdasar semangat kemanusiaan. Spirit ini terfokus pada titik di mana manusia sebagai pemimpin memiliki akal budi sehingga setiap perilakunya dapat menciptakan keadilan dan memartabatkan manusia lainnya. Pada hal kepemilikan, dalam setiap aktivitas ekonomi manusia yang berdasar moral akan menyadari bahwa mereka tidak bisa menuhankan suatu hal yang bersifat materi (kebendaan). Ketika mereka percaya dengan ajaran tuhan yang bertitik pada kepedulian kepada sesama, maka barang yang dimilikinya memiliki fungsi sosial.

Ketiga, keadilan sosial yang merupakan tujuan dari ekonomi pancasila. Dengan terciptanya suatu keadilan, diharapkan tidak ada lagi disintegrasi (perpecahan sosial masyarakat). Ketika sebuah sistem yang berlaku tidak memberikan suatu rasa adil, dapat menyulut suatu konflik yang merugikan bangsa. Keempat adalah 6P (*people, planet, prosperity, partnership, peace* dan *prophet*).

Sosial adalah tentang orang, economic tentang profit, dan *environment* adalah tentang lingkungan alam. Bisnis berkelanjutan di masa akan datang harus memperhatikan ke tiga aspek penting tersebut tanpa meninggalkan satu sama lain.³⁸

Hal ini yang kemudian dijadikan acuan sebagai prinsip pembangunan berkelanjutan PBB dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terdiri dari 5 prinsip, 17 gol dan 169 target, semua itu digunakan untuk melengkapi *Millenium Development Goals* (MDGs) yang masih belum tercapai. Adapun 5 prinsip tersebut adalah pemenuhan hak masyarakat, perlindungan lingkungan untuk kebutuhan produksi atau konsumsi, hak menikmati kesejahteraan, terbebas dari rasa takut, dan kemitraan serta solidaritas. Dalam Ma'ruf Amin Way ada tambahan yang digunakan sebagai acuan penting, yaitu prinsip kenabian. Setiap orang yang terlahir adalah pemimpin, maka tugas membawa misi dari Tuhan menebar kebaikan di dunia. Karena selama ini ekonomi kapitalisme memberikan ajaran kepada manusia dalam hal materialisme serta keserakahan dan menuju pada kerusakan sistem ekonomi dan sosial.³⁹

3) Instrumen keadilan sosial

Instrumen dalam hal ini diartikan sebagai suatu perangkat dalam implementasi konsep ekonomi keumatan. Dalam

³⁸ Ibid., 142-147.

³⁹ Ibid., 149-150.

identifikasinya ada tiga contoh yang bisa dikembangkan. Pertama, jaminan sosial seperti tercantum pasal 34 UUD 1945 bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk jaminan sosial masyarakat. Negara mengembangkan sebuah sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta memiliki tanggung jawab penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang sesuai.⁴⁰

Kedua, Ziswaf. Zakat menjadi salah satu instrumen penting untuk meminimalisir ketimpangan sosial. Dengan menggunakan mekanisme *fundraising* bagi kalangan masyarakat yang mempunyai *resources* lebih untuk didistribusikan masyarakat bawah agar bisa menolong mereka. Adapun jenis filantropi dalam Islam (zakat, infaq dan wakaf) atau bisa disebut Ziswaf, mempunyai beberapa aktor penting, diantaranya *muzakki* (donatur), *amil* (pengelola dana), dan *mustahiq* (penerima manfaat). Meski pertumbuhan signifikan, namun realisasi penghimpunan zakat sangat rendah dibanding potensi membayar zakat yang bisa dibilang cukup besar. Secara fundamental, zakat dan pajak merupakan sebuah aspek penting dan mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kesenjangan ekonomi negara.⁴¹

⁴⁰ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam: menangkap Makna Maqashid Syariah* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 270.

⁴¹ Sahala, Abbas, *The Ma'ruf...*, 152-157.

Ketiga, infrastruktur yang menjadi instrumen keadilan, karena mampu menghilangkan kesenjangan antar sektor, antar daerah dan lain sebagainya. Perbaikan infrastruktur sendiri memiliki tujuan mencapai demokrasi ekonomi. Adanya infrastruktur masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dengan para pemain besar. Ketika infrastruktur logistik bagus, masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam ekonomi digital. Melalui peluang ekonomi yang sama bagi masyarakat mampu memperkecil bahkan menghilangkan ketimpangan sosial yang ada.⁴²

b. Ekonomi keumatan

Ketika masyarakat miskin produktif (usaha mikro) memperoleh modal dan pendampingan mampu memberikan efek dari penguatan ekonomi rakyat. Maka dengan hal ini, ekonomi keumatan merupakan ekonomi kerakyatan yang memiliki keberpihakan kepada rakyat. Perlu sebuah dorongan agar bisa berkembang dan maju. Kunci China sukses dalam membangun ekonominya adalah karena mereka membangun ekonomi dari bawah. Ia mampu keluar dari bayang-bayang industrialis Uni Soviet dan memilih membangun ekonomi rakyat (pertanian).⁴³

Spirit ekonomi keumatan dilakukan dengan membangun ekonomi dari bawah. Pada prinsipnya ekonomi keumatan memilih keuntungan dengan kerja sama dan makmur bersama, berbeda dengan

⁴² Ibid., 158.

⁴³ Mubyarto, *Revolusi...*, 17.

kapitalis yang menggunakan prinsip bersaing untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, tujuan dari ekonomi keumatan adalah pemerataan. Pertumbuhan yang mampu dicapai lebih eksponensial dan *sustainable* (berkelanjutan). Hal ini jelas berbeda ketika melakukan pembangunan ekonomi dengan *trickle-down effect* yang bertitik tumpu pada konglomerat.⁴⁴

1) Filosofi ekonomi keumatan

Pada prinsipnya, ekonomi keumatan merupakan sebuah konsep ekonomi yang berdasar semangat kerakyatan. Dengan bahasa lain, ekonomi keumatan merupakan ekonomi yang berpihak kepada umat. Selain itu ekonomi kerakyatan juga sejalan dengan ekonomi Islam. Terdapat empat tahapan dalam mencapai sinkronisasi sistem ekonomi Indonesia dan Islam. Pertama, restrukturisasi sosio ekonomi, yaitu masyarakat berperan aktif dan konstruktif dalam pembangunan. Kedua, peran negara. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran sebagai komplementer dalam menciptakan iklim sosio ekonomi, pengembangan institusi serta pengawasan. Ketiga, memberikan kenyamanan pada manusia, dalam konteks ini masyarakat dipersiapkan dalam rangka agar bisa memberikan kontribusi yang positif. Keempat, mereduksi konsentrasi kekayaan dan pembuatan keputusan.

⁴⁴ Sahala, Abbas, *The Ma'ruf...*, 169-170.

Beberapa faktor yang menjadikan penting ekonomi keumatan. Pertama, pembangunan dengan pola *trickle down effect* (efek menetes ke bawah) sangat memomorsatukan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan memberikan sebuah efek domino masyarakat di bawah. Maka dalam sistem ini mengandalkan sektor usaha besar yang mempunyai orientasi profit, efisiensi serta penguasaan aset absolut. Kedua, kurang keberpihakan kepada usaha rakyat, sehingga mereka (rakyat) bersaing dengan para usaha besar memakai modal seadanya. Ketiga, pembiaran pada sektor usaha rakyat yang berimbas pada kesenjangan. Secara sederhana, konsepsi pembangunan harus berdasar moralitas, kekeluargaan dan kebersamaan serta pemerataan, dengan adanya hal tersebut rakyat memiliki peran sentral.⁴⁵

2) Landasan ekonomi keumatan

Landasan yang digunakan dalam ekonomi umat ada empat prinsip. Pertama, dasar kemitraan setara dan saling menguntungkan. Dalam prinsip ini, ekonomi harus memegang teguh kerja sama yang mampu saling menguntungkan antara pengusaha besar dan kecil (UMKM). Kedua, ekonomi berjamaah. Secara sederhana hal ini didefinisikan seperti ekonomi kerakyatan yang menekankan akan persatuan. Di dalam ekonomi berjamaah, aktivitas ekonomi ditekankan saling membantu, gotong royong dan semangat untuk kerja sama. Dengan menggunakan konsep ini,

⁴⁵ Sahala, Abbas, *The Ma'ruf...*, 171-175.

manusia tidak hanya semata sebagai makhluk ekonomi, namun juga sebagai makhluk sosial.

Ketiga, demokrasi ekonomi. Perekonomian sendiri disusun atas dasar asas kekeluargaan, maka kemakmuran bersama lebih penting dari pada kepentingan individu. Oleh karena itu, segala sumber daya yang ada harus dimiliki dan dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Keempat, ekonomi arus bawah. Hal ini berarti pembangunan harus berasal dari rakyat. Konsep *trickle down effect* yang dipakai yang diharapkan mampu mewujudkan pemerataan malah yang terjadi ketimpangan. Dalam konsep arus bawah, pemerataan lebih diutamakan dan diprioritaskan daripada pertumbuhan (pemerataan untuk pertumbuhan).⁴⁶

3) Instrumen ekonomi keumatan

Instrumen yang bisa dikembangkan dalam ekonomi keumatan kemungkinan ada tiga unsur. Pertama, koperasi yang merupakan sebuah usaha yang dibangun atas asa bersama untuk bisa diniati secara bersama. Kedua, perusahaan atau usaha yang mengarah ke basis sosial. Hal ini dimaksudkan agar mampu menyelesaikan misi dalam memecahkan problem sosial, selain itu *social enterprise* dapat dijadikan sebagai *role model* aktivitas ekonomi yang berpihak pada umat. Ketiga, dewan pengelolaan masjid. Lembaga ini mampu menjadi *role model* pengelolaan usaha

⁴⁶ Ibid., 177-181.

yang mampu memberikan kemanfaatan yang besar bagi banyak masyarakat ketika dikelola secara profesional.⁴⁷

c. Ekonomi berkemandirian

Kontribusi UMKM sangat besar dalam perekonomian nasional dan bahkan bisa disebut sebagai motor perekonomian nasional. Beberapa alasan yang menjadi penyebab UMKM menjadi motor penggerak dalam ekonomi nasional. Pertama, UMKM didominasi oleh rakyat. Kedua, tingkat pemerataan cukup tinggi karena didominasi oleh rakyat. Ketiga, memiliki penyerapan tenaga kerja terbesar. Maka dalam konsep Ma'ruf Amin selalu berpendapat tentang pentingnya keberpihakan pada ekonomi rakyat.⁴⁸

1) Filosofi kemandirian ekonomi

Moh. Hatta dan Ir. Soekarno pernah berkata bahwa imperialisme akan membawa kesengsaraan bagi Indonesia, maka bangsa Indonesia harus menentukan nasibnya sendiri, mengelola pemerintahan sendiri untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian yang berlaku di era kolonialisme memiliki orientasi pada kebendaan, individual, saling membunuh, dan kerakusan. Para pendiri bangsa meletakkan sebuah pondasi bangsa bernama nasionalisme sebagai antitesis dari kolonialisme.⁴⁹ Upaya telah dilakukan bangsa Indonesia dalam membangun kemandirian

⁴⁷ Ibid., 181.

⁴⁸ Ibid., 198-199.

⁴⁹ Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan* (Yogyakarta: Aditya media, 1999), 7.

ekonomi, sepanjang 1950 – 1965 banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, seperti merilis program Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) dan Program Benteng dengan berdasar latar belakang lemahnya kelas pengusaha pribumi yang diakibatkan oleh dominasi perusahaan asing. Program ini memiliki tujuan membangkitkan kelas pengusaha pribumi (perusahaan milik negara). Namun, program ekonomi yang lahir acap kali sarat dengan kepentingan politik, karena setiap kali ganti kabinet pemerintahan secara umum ganti program ekonomi nasional.⁵⁰

2) Landasan kemandirian ekonomi

Landasan kemandirian ekonomi didasarkan atas beberapa prinsip. Pertama redistribusi aset. Upaya ini dilakukan guna mewujudkan keadilan masyarakat. Selama ini aset banyak dikuasai oleh masyarakat besar sehingga masyarakat kecil tak mampu berdaya. Kepemilikan aset oleh sebagian orang kan menjadikan ketergantungan terhadap pihak lain sehingga tidak adanya kesempatan sama sebagaimana demokrasi ekonomi. Dalam hal ini pandangan atas tiga asas pengaturan kepemilikan diantaranya: bagaimana harta diperoleh, bagaimana pengelolaan kepemilikan harga, dan bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat.

Kedua, amanat konstitusi. Selama ini, Indonesia berada pada titik yang tidak setara dengan bangsa lain dalam hal

⁵⁰ Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980* (Jakarta: LP3ES, 1991).

kerjasama. Maka dalam UUD 1945 pasal 33 diamanatkan bahwa segala kekayaan alam harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat. Ketiga, berdikari. Dunia tanpa sekat dan maraknya produk asing di dalam negeri merupakan landasan masih relevannya sikap untuk tetap berdikari. Melalui produk yang masuk dari perusahaan global yang secara tidak sadar kita konsumsi adalah suatu bentuk penjajahan dalam bentuk baru. Dengan dominasi produk asing ini, berimbas pada banjirnya barang impor yang mengakibatkan neraca perdagangan defisit, rupiah melemah, industri dalam negeri mengalami kematian, UMKM terpuruk serta pelarian keuntungan investasi. Keempat, pemberdayaan. Dalam kemandirian ekonomi, pemberdayaan merupakan sebuah upaya dalam mengangkat martabat ekonomi rakyat agar bisa bersaing di pasar. Maka secara sederhana selalu digalakkan dengan pentingnya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar.⁵¹

3) Instrumen kemandirian ekonomi

Ada tiga identifikasi yang bisa dikembangkan dalam kemandirian ekonomi. Pertama, kontribusi BUMN dalam upaya membangun kemandirian. Karena memang BUM di sini memiliki peran penting, yaitu sebagai kontribusi bagi penerimaan negara, pemberdayaan UMKM dan pelayanan jaminan sosial. Maka di sini pentingnya penekanan kemitraan antara BUMN dengan koperasi agar tercipta keharmonisan untuk mendorong pertumbuhan satu

⁵¹ Sahala, Abbas, *The Ma'ruf...*, 205-210.

dengan yang lainnya tanpa membunuh. Kedua, UMKM yang kompetitif. Karena dengan hal ini, negara mampu bersaing dengan ancaman pemain luar. Ketika tidak adanya dorongan untuk maju ada kemungkinan besar UMKM diserang oleh asing. Ketiga, pondok pesantren. Dalam pandangan ini pondok pesantren bisa dijadikan sebagai pusat inkubasi bisnis untuk pengelolaan pesantren dan masyarakat sekitar.⁵²

Adapun strategi yang mampu diterapkan dalam pembangunan ekonomi bisa dilakukan dalam tingkat mikro di desa. Ada lima aktor penting dalam mewujudkan hal ini, yaitu: BUMDES, Koperasi, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Bank Wakaf Mikro (BWM) dan pondok pesantren. Namun untuk mengembangkan aktor tersebut ada tiga hal yang mampu menjadi pendukung, diantaranya:

- a. Akses modal (*capital*). Dari sisi permodalan perlu adanya dukungan modal dari pemerintah pusat atau daerah, karena semakin mudahnya mereka memperoleh modal maka semakin besar pula peluang dalam meningkatkan bisnis skala besar serta kemanfaatannya.
- b. Kompetensi (*competence*) atau peningkatan kapabilitas (*capacity building*). Keterampilan di desa tidak hanya cukup ketika dibantu dengan modal, namun juga butuh peningkatan keterampilan dalam mengelola bisnis. Karena ketika semakin terampilnya kewirausahaan yang dimiliki akan memperoleh *fundraising* yang didapatkan lebih besar.

⁵² Sahala, Abbas, *The Ma'ruf...*, 212-216.

c. Akses pasar (*commerce*). Hal ini berarti membantu mereka agar produk-produk yang dibuat bisa diterima di pasar dalam skala luas. Karena ketika produk yang bisa dijual semakin banyak akan mampu memperoleh keuntungan yang banyak dan memberikan manfaat kepada masyarakat lebih besar.⁵³

Berdasarkan data di atas secara ringkas pemikiran pembangunan ekonomi KH.Ma'ruf Amin berdasar atas 3 gagasan besar, yaitu ekonomi keadilan, ekonomi keumatan dan ekonomi berkemandirian. Di dalam konsep ekonomi keadilan selaras dengan salah satu sila dengan Pancasila pada sila ke 5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Selain itu keinginan dari ekonomi keadilan ialah meminimalisir bahkan menghilangkan kemiskinan, hal itu ketika digambarkan dalam kurva keadaan yang sekarang kurva yang berbentuk piramida menuju kurva ketupat bahkan menjadi gunung wayang. Di dalam ekonomi keadilan Ma'ruf Amin, harus dilandasi dengan nilai keagamaan dimana moral menjadi salah satu unsur penting di dalam merealisasikannya.

Selanjutnya adalah konsep ekonomi keumatan atau bisa dikenal dengan sebutan ekonomi kerakyatan. Konsep ini hampir serupa dengan salah satu konsep tokoh ekonomi Indonesia (Moh. Hatta) yang menekankan pada semangat kerakyatan dalam upaya pembangunannya. Tujuan dari gagasan ini adalah sebagai upaya untuk mempersempit jurang kesenjangan yang terjadi (si miskin dan si kaya). Namun untuk merealisasikan hal itu, harus ditekankan adanya sebuah gotong royong,

⁵³ Ibid., 224-227.

kerja sama, memupuk persatuan, dan semangat mewujudkan demokrasi ekonomi. Konsep terakhirnya adalah ekonomi berkemandirian (berdikari). Semangat untuk berdikari ini memang sangat penting sekali, mengingat Indonesia sendiri pernah mengalami masa yang sulit selama bertahun-tahun akibat penjajahan yang dilakukan negara asing. Hal itu pun dalam maksud untuk mengurangi konsentrasi kekayaan yang dimiliki oleh segelintir golongan/pihak saja. Itupun selaras dengan islam yang tidak memperbolehkan adanya praktik monopoli yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Maka atas dasar hal tersebut, pentingnya atas kemitraan usaha besar dan kecil serta dorongan untuk mampu kompetitif agar usaha yang dibangun mampu tumbuh dan bersaing sehingga tidak diserang oleh pihak asing.⁵⁴

Namun untuk menunjang semua itu dibutuhkan sebuah peran pemerintah sebagai upaya untuk mampu mengokohkan konsep-konsep tersebut. Upaya pemberian akses modal yang memungkinkan mereka pelaku usaha mengembangkan usahanya, peningkatan kompetensi dan kapabilitas guna untuk menunjang pengelolaan bisnis agar memperoleh keuntungan yang lebih besar serta akses pasar yang memungkinkan mereka untuk bisa memperluas produk atas jasanya bisa diterima secara lebih luas. Ketika semua itu bisa direalisasikan maka imbalan yang bisa diperoleh masyarakat akan semakin banyak.⁵⁵

⁵⁴ Sahala, Abbas, *The Ma'ruf...*, 115-193.

⁵⁵ *Ibid.*, 225-227.

C. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Pembangunan Ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin.

Kedua tokoh ini, M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin merupakan dua tokoh pemikir ekonomi yang berbeda negara, berbeda keadaan sosial, ekonomi, politik dan latar belakang pendidikannya. M. Umer Chapra dibesarkan di lingkup keluarga yang begitu taat beragama, hal itu menjadikannya menjadi seorang sosok yang religius dan berkarakter dan di dalam pendidikannya pun ia sampai pada doktor (S3), sedangkan KH. Ma'ruf Amin merupakan seorang tokoh yang lebih banyak dibesarkan dalam pendidikan basis agama yang kuat dan tinggal di lingkungan dengan nilai religius kental (pondok pesantren), dalam menempuh pendidikan ia hanya sampai pada sarjana (S1). Namun KH. Ma'ruf Amin mendapatkan gelar doktor sebagai kehormatan (doktor honoris causa) dan profesor atau guru besar di bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah karena kecemerlangan beliau dan gerakannya dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Pada bagian ini akan dibahas mengenai ekuivalensi pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin. Dengan begitu, nantinya bisa dilihat dari persamaan dan perbedaan dari pemikiran kedua tokoh yang hidup di negara berbeda dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda pula, namun disini keduanya memang sama-sama bergelut dalam dunia ekonomi dengan gagasan konsep masing-masing agar mampu membuat perubahan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negaranya masing-masing. Beberapa ekuivalensi pemikiran

pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin adalah berikut:

1. Pembangunan ekonomi yang berkeadilan

Kesamaan antara pemikiran M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin terletak pada pandangannya bahwa mewujudkan masyarakat yang berkeadilan merupakan cita-cita dari sebuah negara. Keduanya memandang bahwa tujuan negara melakukan pembangunan ekonomi adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun yang membedakan dari keduanya adalah bahwa KH. Ma'ruf Amin dalam pemikirannya tidak hanya menjadikan adil sebagai tujuan, namun ia juga memandang adil sebagai sebuah konsep dalam melakukan pembangunan, ia menyebutnya dengan sebuah konsep ekonomi berkeadilan.

2. Pemerataan sosial menjadi tolak ukur dalam pembangunan

M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin sama sama memiliki pandangan bahwasanya pemerataan aset bagi masyarakat merupakan hal sangat penting dan menjadi salah satu tolak ukur. Kedua memandang ketika sebelumnya masyarakat miskin banyak kemudian tidak ada lagi masyarakat miskin atau masyarakat miskin berkurang (sedikit), maka pembangunan yang dilakukan dengan menyetarakan struktur sosial dalam suatu negara bisa juga dikatakan mampu untuk direalisasikan. Keduanya juga memandang dalam Islam sangat menekankan akan pemerataan, sehingga hal itu harus dilakukan agar bisa menghilangkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Namun metode yang digunakan dalam mewujudkan pemerataan dari pandangan keduanya berbeda. Chapra memandang agar bisa mewujudkan pemerataan yaitu dengan menggunakan penyaringan moral. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kecurangan atau monopoli dalam sumber daya yang ada, sehingga melalui hal tersebut mampu mewujudkan sebuah alokasi sumber daya yang efisien dan merata. Sedangkan Ma'ruf memandang bahwa untuk bisa mewujudkan pemerataan maka dibutuhkan sebuah gagasan ekonomi yang berpihak pada umat (rakyat). Hal ini ia tambahkan dengan sebuah metode pembangunan berbasis rakyat (*bottom up economics*) yang menggunakan sebuah demokrasi ekonomi.

3. Peran negara dalam mendukung pembangunan ekonomi

Menurut M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin peran negara (pemerintah) sangat menentukan dalam realisasi pembangunan ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan negara nantinya yang akan memberikan pengaruh dalam implikasi kemudahan maupun kesulitan dalam merealisasikan pembangunan ekonomi. Namun dalam peran lain yang seharusnya ditekankan negara oleh kedua tokoh ini memiliki sudut pandang yang berbeda. Chapra lebih menekankan pada peran negara melalui kebijakan yang diambil harus benar dan mendukung adanya jaminan kenyamanan terhadap manusia, pemerataan, restrukturisasi ekonomi dan finansial. Sedangkan Ma'ruf lebih menekankan pada pembentukan dan perhatian kepada lembaga ekonomi dengan melakukan pendanaan, peningkatan kualitas dan kapabilitas serta perluasan bantuan untuk memperluas akses pasar.

4. Moral sebagai pembangunan ekonomi

Pandangan M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin terhadap moral memang sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Keduanya menyepakati ketika menginginkan sebuah pembangunan yang adil maka setiap individu harus menguatkan moral (spirit keagamaan/tauhid) agar terhindar dari perilaku *moral hazard*. Di sisi lain Chapra memandang moral sangat menentukan dan sebagai kunci dari cita-cita pembangunan ekonomi, karena tanpa moral pembangunan dan upaya dalam bentuk apapun tidak akan bisa terealisasi dan masih banyak dari manusia yang melakukan penyelewengan seperti korupsi, monopoli barang dan penyelundupan barang-barang yang tidak diperbolehkan (ilegal) menurut negara dan agama.

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas dalam memahami pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin, maka penulis menyajikan perbandingan pemikiran kedua tokoh dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 1

Pembangunan Ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin

Keterangan	M. Umer Chapra	KH. Ma'ruf Amin
Konsep dasar pembangunan	Penyaringan klaim berlebihan, motivasi, restrukturisasi sosio ekonomi, peran negara	Keadilan, keumatan, kemandirian

Objek dan subjek pembangunan	Manusia, lingkungan dan spiritual	Manusia, lingkungan dan spiritual
Landasan pembangunan	<i>Tauhid, khilafah</i> dan <i>'adalah</i>	Moral, kemanusiaan, keadilan sosial, kemitraan, persatuan, demokrasi dan kemandirian.
Indikator pembangunan	Pemerataan kekayaan, padat karya, budaya menabung dan investasi serta ekspor lebih besar dari impor	Struktur sosial gunung wayang, jaminan sosial, distribusi kekayaan, infrastruktur, berpihak pada rakyat, daya saing nasional dan internasional
Tujuan pembangunan	Kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia	Kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia
Peran negara	Komplementer melalui internalisasi nilai Islam, iklim sosio ekonomi sehat, pengembangan institusi yang tepat.	Dukungan akses modal, peningkatan kapabilitas, akses pasar serta kebijakan yang mengarah pada kepentingan rakyat dengan prinsip kemandirian dan nilai keagamaan.

D. Relevansi Pemikiran Pembangunan Ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Pasca penulis memaparkan pemikiran pembangunan ekonomi dalam pandangan M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin dan persamaan dan perbedaan pemikiran diantara kedua tokoh, selanjutnya dalam sub bab ini penulis akan memaparkan relevansi pemikiran pembangunan kedua tokoh tersebut dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

1. Relevansi pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra

Pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Garis besar pemikirannya mencakup tentang penekanan pada moral, pemerataan aset ekonomi, restrukturisasi dalam sosio ekonomi, budaya untuk menabung dan investasi serta peran negara melalui kebijakannya untuk merealisasikan hal tersebut. Bila dikaji secara fundamental pemikiran beliau cukup relevan dengan konsep pembangunan ekonomi Pancasila di Indonesia.

Mengacu pada pemikiran M. Umer Chapra yang menekankan moral sebagai kunci dari pembangunan, maka hal ini selaras dengan pembangunan ekonomi Pancasila di Indonesia yang menggunakan asas ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa sebagai landasan dalam melakukan pembangunan. Dalam hal ini spiritualitas menjadi sebuah dasar yang harus dimiliki oleh warga negara ketika menginginkan sebuah pembangunan, karena melalui pembangunan akhlak yang baik pembangunan yang berkeadilan akan mampu diwujudkan.

Chapra menekankan agar asas pemerataan dan restrukturisasi sosio ekonomi harus dipakai agar bisa mewujudkan cita-cita pembangunan berkeadilan. Di negara Indonesia dengan ekonomi Pancasila juga menjadikan kemanusiaan dan demokrasi sebagai dasar ideal. Hal ini bisa dilihat pada Undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) pasal 27 ayat 2, pasal 33 ayat 1 dan pasal 34 ayat 2. Adapun isi undang-undang tersebut sebagai berikut:

- a. Pasal 27 ayat 2: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Pasal 33 ayat 1: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
- c. Pasal 34 ayat 2: negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan.⁵⁶

Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya di Indonesia sendiri sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam melakukan pembangunan ekonomi. Jaminan kebebasan bekerja, jaminan sosial dan pemberdayaan akan masyarakat lemah menjadi suatu hal sangat penting untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Selain itu

⁵⁶ Muhammad Akbararrizal, "Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia," dalam https://www.academia.edu/36371244/HAK_DAN_KEWAJIBAN_WARGA_NEGARA_INDONESIA_PASAL_27_34_UUD_1945, (diakses pada tanggal 17 November 2021, jam 20.09).

penyelenggaraan pembangunan ekonomi atas demokrasi ekonomi salah satunya adalah dengan pemerataan yang menekankan pada perubahan strukturisasi masyarakat agar kesenjangan antara si miskin dan si kaya bisa dihilangkan.

Tujuan dari pembangunan ekonomi Chapra adalah kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Di dalam pembangunan ekonomi Indonesia juga memiliki tujuan pembangunan ekonomi yang termaktub di dalam sila ke 5 pancasila (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Dari segi tujuan pemikiran Chapra sangat relevan dengan cita-cita pembangunan ekonomi di Indonesia. Selain pada sila pancasila ke 5 tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia juga termaktub pada visi dan arah pembangunan jangka panjang (PJP) Tahun 2005-2025 di bagian 2 dijelaskan visi dari pembangunan ekonomi sendiri yaitu: terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menunjang persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa.⁵⁷

Pembangunan ekonomi yang berkeadilan merupakan suatu hal diinginkan dan dicita-citakan warga negara, bahkan tidak hanya warga negara Islam, namun semua warga negara di Indonesia pastinya menginginkan negara yang adil dan sejahtera. Maka dalam pemikirannya

⁵⁷ Republik Indonesia, *Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025* (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2005), 30.

Chapra menambahkan untuk merealisasikan gagasannya ia menambahkan terkait peran negara dalam menunjang konsep pembangunan yang digagas melalui kebijakan yang sesuai dengan Islam.

Pemikiran Chapra mengenai peran negara yaitu negara sebagai komplementer melalui internalisasi nilai Islam, iklim sosio ekonomi sehat, pengembangan institusi yang tepat. Pada pemikiran Chapra ini menekankan bahwa negara hanya sebagai regulasi dan segala kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam yaitu kesejahteraan (*fallah*) seluruh umat. Hal ini pun dengan selaras dengan pembangunan ekonomi di Indonesia pada pasal 33 ayat 2,3 dan 4. Adapun isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 33 ayat 2: cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- b. Pasal 33 ayat 3: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
- c. Pasal 33 ayat 4: perekonomian nasional diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat”.⁵⁸

Pada tataran ini, negara yang menguasai hajat orang banyak serta menguasai sumber daya alam yang ada, maka dengan ini sumber daya yang ada untuk pembangunan harus digunakan untuk kepentingan

⁵⁸ Akbararrizal, “Hak dan Kewajiban...,”

rakyatnya. Dalam hal ini Kebijakan-kebijakan yang dibuat haruslah mengarah pada kemakmuran untuk seluruh rakyat, bukan hanya kepada sebagian rakyat saja. Maka dengan jalan ini keadilan sosial yang menjadi cita-cita negara akan mampu direalisasikan.

2. Relevansi pemikiran pembangunan ekonomi KH. Ma'ruf Amin

Berdasar pondasi dasar yang dibangun dan cita-cita KH. Ma'ruf Amin menginginkan sebuah pembangunan ekonomi yang berkeadilan dengan prinsip gotong royong dan berdikari (mandiri) sesuai dengan asas dasar negara Indonesia (pancasila). Dalam hal ini pemikiran pembangunan ekonomi KH. Ma'ruf Amin dan pembangunan ekonomi di Indonesia menggunakan asas dasar yang sama yaitu pancasila sebagai dasar atau pondasi dalam pembangunan. Dasar perumusan pancasila merupakan sebuah asas yang dijadikan negara untuk dijadikan pedoman bangsa dalam mewujudkan cita-cita negara (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Sehingga dalam pemikiran pembangunan ekonomi Ma'ruf Amin dan pembangunan di Indonesia selaras dan sangat relevan.

Cita-cita pembangunan yang berkeadilan yang digagas oleh Ma'ruf amin bukan keadilan yang hanya diperuntukkan untuk sebagian golongan, namun untuk seluruh umat manusia yang ada di Indonesia. Ma'ruf Amin juga menginginkan masyarakat Indonesia bisa keluar dari jurang kemiskinan. Hal ini ada pada instrumen pembangunan ekonomi keadilan Ma'ruf Amin melalui jaminan sosial, ZISWAF dan infrastruktur.

Di negara Indonesia jaminan sosial juga termaktub di dalam UUD 1945 pasal 34 yang itu juga direalisasikan dalam bentuk BPJS dan asuransi

yang ada untuk masyarakat Indonesia. Pada instrumen ZISWAF negara Indonesia juga sudah membentuk sebuah lembaga BAZNAS dan lembaga amil zakat lain yang dikelola masyarakat sipil seperti Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa. Pada arah pembangunan infrastruktur sudah ditunjang dengan Peraturan Presiden RI nomor 56 tahun 2018 yang pada tanggal 20 Juli 2018 terdapat 227 proyek yang dimasukkan PSN (64 pembangunan jalan tol, 57 pembangunan bendungan dan jaringan irigasi dan pembangunan lainnya).

Pembangunan yang dilakukan melalui akar rumputnya melalui konsep keumatan atau dalam Moh. Hatta dikenal dengan konsep kerakyatan. Hal ini mulai digencarkan oleh Negara Indonesia melalui pengembangan koperasi dan kepedulian sosial. Instrumen ini salah satunya didasarkan pada koperasi. Ini bisa dilihat dari banyaknya koperasi yang ada di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 127.124 unit dengan 25.098.807 anggota yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.⁵⁹ Dalam pengelolaan koperasi ini yang menggunakan prinsip gotong royong menuntut kepada mereka untuk bertanggung jawab mengelola koperasi secara bersama-sama dan mandiri. Selain itu kepedulian sosial juga dilakukan melalui lembaga amil zakat yang telah dijelaskan di atas.

Selanjutnya UMKM yang berdaya merupakan gagasan Ma'ruf Amin melalui konsep ekonomi berkemandirian. Hal ini didorong dengan

⁵⁹ Tira Santia, "KemenkopUKM Gandeng Perpunas Tingkatkan Literasi Pelaku Koperasi dan UMKM," dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4647217/kemenkopukm-gandeng-perpunas-tingkatkan-literasi-pelaku-koperasi-dan-umkm>, (diakses pada tanggal 17 November 2021, jam 21.01)

kemudahan dalam kredit usaha rakyat dan pemberian akses modal, pengembangan kompetensi dan akses pasar diharapkan mampu mengembangkan UMKM rakyat yang mandiri. Selain itu, pemerintah menguatkan UMKM dengan berbagai bantuan yang terhitung pada 31 Juli 2021 tercatat 3.59 juta UMKM telah memanfaatkan program dengan menyerap dana 285.17 triliun.⁶⁰



⁶⁰ Kementerian Keuangan, “Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui Berbagai Bentuk Bantuan,” dalam <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/>, (diakses pada tanggal 17 November 2021, jam 21.30)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai studi komparasi pemikiran M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin tentang pembangunan ekonomi yang memiliki perbedaan secara geografis, pendidikan dan realitas sosial waktu itu, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pemikiran pembangunan ekonomi

a. M. Umer Chapra

Pembangunan ekonomi Chapra tidak hanya membangun pertumbuhan ekonominya, namun juga harus ada pembangunan moral dan sosial dari dalam diri manusia. Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu: adanya peran pemerintah, keharmonisan sosio ekonomi, budaya menabung dan investasi tinggi, support positif peran negara serta motivasi secara substansi melakukan impor dan promosi ekspor untuk industri.

b. KH. Ma'ruf Amin

Pemikiran pembangunan ekonomi KH. Ma'ruf Amin berdasar tiga gagasan besar (ekonomi keadilan, ekonomi keumatan dan ekonomi berkemandirian). Tujuan konsep ekonomi Ma'ruf Amin adalah meminimalisir bahkan menghilangkan kemiskinan, dan mempersempit jurang kesenjangan (si miskin dan si kaya). Konsep tersebut harus dilandasi dengan nilai keagamaan, adanya penekanan sikap gotong

royong, kerja sama, memupuk persatuan, dan semangat mewujudkan demokrasi ekonomi. Selain itu upaya pemberian akses modal, peningkatan kompetensi dan kapabilitas, serta perluasan akses pasar. Ketika semua itu bisa direalisasikan maka imbalan yang bisa diperoleh untuk masyarakat akan semakin banyak.

2. Persamaan dan perbedaan pemikiran pembangunan ekonomi

M.Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin

Pada dasarnya pemikiran ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin mempunyai kesamaan dalam pondasi dasar, tujuan, serta upaya mewujudkan pembangunan melalui etika, moral, akhlak. Keadilan sebagai orientasi yang dibangun sebagai cita-cita pembangunan ekonomi dilakukan melalui pemerataan untuk mengurangi bahkan mengentaskan kemiskinan, serta peran negara melalui kebijakan dan pendidikan yang mengarah kepada kepentingan masyarakat.

Namun penekanan dan cara-cara yang dilakukan oleh kedua tokoh memiliki perbedaan. Ketika Chapra lebih menekankan penguatan moral dan peran negara dalam bentuk kebijakan (regulasi) sebagai upaya yang penting dalam melakukan pembangunan, Ma'ruf lebih menekankan spirit keagamaan, sikap kerja sama masyarakat dan peran negara melalui pemberian fasilitas (akses modal, pelatihan dan akses pasar).

3. Relevansi pemikiran kedua tokoh terhadap pembangunan di Indonesia

Namun secara substansi pemikiran kedua tokoh tersebut relevan dengan cita-cita pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembangunan yang

dilakukan di Indonesia dengan berdasar pada landasan dasar negara yaitu pancasila, yang di dalamnya melakukan pembangunan dengan berdasarkan kebaikan dan menjauhi dalam hal keburukan (melarang *moral hazard*), melakukan kerja sama, mengentaskan kemiskinan, menghilangkan kebodohan, dan bercita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

B. Saran

Setelah melakukan telaah pemikiran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang bisa dijadikan renungan dan evaluasi untuk beberapa pihak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepada para akademisi

Peneliti pemikiran pembangunan ekonomi hendaknya perlu meningkatkan penelitiannya berkaitan dengan tokoh-tokoh pembangunan ekonomi Islam lainnya, karena realitas sebagian negara muslim atau mayoritas penduduknya muslim masih dalam tingkatan negara berkembang sehingga membutuhkan sebuah formulasi yang strategis dalam menyelesaikan problem-problem yang ada.

2. Kepada para praktisi

Hendaknya mampu menjadikan pemikiran pembangunan ekonomi Islam menjadi sebuah landasan dalam upaya melakukan pembangunan ekonomi bangsa dan negara. Serta supaya cita-cita pembangunan negara mampu diwujudkan untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan untuk rakyatnya.

3. Bagi para pembaca

diharapkan untuk bisa menelaah secara kritis dan komprehensif sehingga penulis berharap, dari pembaca bisa memberikan sebuah masukan, kritik dan saran yang membangun agar berguna untuk menyempurnakan penelitian yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam: menangkap Makna Maqashid Syariah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata, 2010.
- Arif, Muhammad. *Filsafat Ekonomi Islam*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- dan Habib Ahmed. *Lembaga Keuangan Syariah*, terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Dkk, Bonaraja Purba. *Ekonomi Pembangunan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Lexy, J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mubyarto. *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Aditya media, 1999.
- . *Revolusi Menuju Sistem Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2004.
- Muhaimin, Yahya A.. *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. Jakarta: LP3ES, 1991.

- Muhammad Hasan, Muhammad Aziz. *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Lokal*. Makasar: CV Nurlina, 2018.
- Panggabean, Sahala, dan Anwar Abbas. *The Ma'ruf Amin Way*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019).
- Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Jakarta:PT. Zahir Syariah Indonesia,2018.
- Sasono, Adi. *Rakyat Bangkit Bangun Martabat*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Suwandi, dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Al mizan. "Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Dalam *Maqdis: Jurnal kajian Ekonomi Islam*. Volume 1, Nomor 2, 2016: 204-222.
- Arifi, Moh. Musfiq. "Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam: Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun dan Umer Chapra." *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume 4, Nomor 2, 2019: 125-138.
- Aryu Inayati, Anindya. "Pemikiran Ekonomi Islam." dalam *Profetika: Jurnal Studi Islam*. Volume 14, Nomor 2, 2013: 164-176.
- Budiawati, Yuni. "Konsep Pembangunan Perekonomian Indonesia: Studi Komparatif Pemikiran Bung Hatta dan Syarifuddin Prawiranegara." *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

- Effendi, Syamsul. "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis." Dalam *JRAM: Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*. Volume 6, Nomor 2, 2019: 147-158.
- Fadlan. "Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam: Telaah Pemikiran M. Umer Chapra." Dalam *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*. Volume 15, Nomor 2, 2018: 394-426.
- Famrizal, Andi. "Analisis Faktor Ekonomi dan Faktor Non Ekonomi Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi." Dalam *Jurnal Katalogis*. Volume 5, Nomor 8, 2017: 191-203.
- Faqih, Ahmad. "Analisis Pemikiran The Kian Wie Tentang Pembangunan Ekonomi Dalam perspektif Ekonomi Islam." *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Harahap, Isnaini. "Ekonomi Pembangunan: Pendekatan Transdisipiner." Dalam <http://repository.uinsu.ac.id/5797/1/EKONOMI%20PEMBANGUNAN.pdf>.
- Hasim Ashari, Aan Nur. "Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Kerakyatan Perspektif Ekonomi Islam Muhammad Abdul Manan." *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Huda, Choirul. "Ekonomi Islam dan Kapitalisme (Menurut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam." Dalam *Economica: Jurnal ekonomi*. Volume VII Edisi 1, 2016: 27-49.

- Marcks Andika Kuncoro, Onny Kusuma. "Pandangan M. Umer Chapra Tentang Upaya Menekan Inflasi Pada Tingkat Sangat Rendah Perspektif Ekonomi Islam," *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Maruta, Heru. "Sejarah Sistem Ekonomi." Dalam *Iqtishoduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. Volume 3, Nomor 1, 2014: 647-656.
- Mulyadi, Dedi. "Pemikiran Ekonomi Islam Umer Chapra: Studi Analisis Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, dan Negara Sejahtera," dalam *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. Volume 10, Nomor 2, 2016: 168-180.
- Santi, Mei. "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," Dalam *Jurnal Eksyar: Ekonomi Syariah & Bisnis Islam*, Volume 6, Nomor 1, 2019: 47-56.
- Saputra, Bayu Adi. "Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut M. Umer Chapra." *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Sholeh, Arif. "Konsep Pembangunan Ekonomi: Studi Komparatif Pemikiran Mubyarto dan Umer Chapra." *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Su'aidi, Mohammad Zaki. "Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Masa Depan Ekonomi Islam," Dalam *Isyraqi: Jurnal Keislaman*. Volume 1, Nomor 1, 2021: 14-32.
- Saparuddin. "vitalisasi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kemandirian Perekonomian Umat," Dalam *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*. Volume 1, Nomor 1, 2021; 14-32.

Tohir, Moh. “Rekonstruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut

Pemikiran Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan M. Umer Chapra.” *Skripsi*. Jakarta:

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

https://id.wikipedia.org/wiki/Ma%27ruf_Amin/. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021, jam 19.00 WIB.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20191006/15/1155818/maruf-amin-way-mengenal-lebih-dekat-pemikiran-ekonomi-umat-ala-maruf-amin>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2021, jam 10.01 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2008/09/10/17412844/Maruf.Luncurkan.Tiga.Buku.Keislaman>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2021, jam 09.00 WIB.

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/ppty9b456/pemikiran-maruf-amin-dituangkan-ke-buku-bertema-ekonomi>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2021, jam 09.54 WIB.

https://www.academia.edu/36371244/HAK_DAN_KEWAJIBAN_WARGA_NEGARA_INDONESIA_PASAL_27_34_UUD_1945. Diakses pada tanggal 17 November 2021, jam 20.09 WIB.

<https://www.ekonomisyariah.org/9201/arus-baru-ekonomi-syariah-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2021, jam 11.17 WIB

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/>. Diakses pada tanggal 17 November 2021, jam 21.30 WIB.

<https://kumparan.com/kumparannews/ma-ruf-amin-dan-gelar-profesor-doktor-bidang-ekonominya-1533814983435184869/2>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2021, jam 19.07 WIB).

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4647217/kemenkopukm-gandeng-perpurnas-tingkatkan-literasi-pelaku-koperasi-dan-umkm>. Diakses pada tanggal 17 November 2021, jam 21.01 WIB.

<https://www.presidenri.go.id/wakil-presiden-maruf-amin/>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021, jam 18.03 WIB.

